

**KONSTRUKSI BERITA OPERASI TANGKAP TANGAN ROMAHURMUZIY
OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

(Analisis Framing Model Murray Adelman Pada Laman *RMOL.co* Edisi Maret 2019)

***CONSTRUCTION OF HAND CATCHING OPERATIONS NEWS ROMAHURMUZIY
BY CORRUPTION ERADICATION COMMISSION***

(Murray Adelman's Framing Analysis Model in Page *RMOL.co* Edition March 2019)

Penulis: Launa merupakan Dosen FISIP Universitas Bung Karno
Email: launa2011@gmail.com

ABSTRAK

Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas Romahurmuziy (Romi) menyingkap tabir fenomena korupsi politik sistemik elite politik yang berada di lingkaran inti kekuasaan. Tak ayal, peristiwa OTT KPK ini mendapat liputan luas dan menjadi isu panas di media massa, termasuk di portal berita *RMOL.co*. Framing berita OTT Romi penting untuk dikaji mengingat konstruksi media tak selalu mencerminkan realitas yang ada. Penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana *RMOL.co* membingkai kasus OTT KPK Romi melalui penggunaan elemen analisis framing model Murray Adelman (kategorisasi, ideologi, rubrikasi, dan klasifikasi) sebagai perangkat analisis teks berita atas kasus OTT Romi. Hasil penelitian menunjukkan pemberitaan *RMOL.co* cenderung berpihak pada pengungkapan kasus OTT Romi. Penonjolan *RMOL.co* atas kasus OTT Romi terlihat dari framing berita *RMOL.co* yang lebih banyak menyoroti sisi negatif OTT Romi disatu sisi, serta sisi positif KPK pada sisi lain, terutama kinerja KPK dan kubu BPN Prabowo-Sandi terkait OTT KPK pada elite politik yang selama ini kerap berlindung dibalik tirai kekuasaan.

Kata kunci: analisis framing, aktor politik, operasi tangkap tangan, korupsi politik.

ABSTRACT

Hand Cathing Operations (HCO) The Corruption Eradication Commission on Romahurmuziy (Romi) reveals the phenomenon of systemic political corruption in the political elite in the core circle of power. No doubt, the events of the KPK capture received wide coverage and became a hot issue in the mass media, including on the news portal *RMOL.co*. Framing the news of Romi's capture is important to study because the construction of media does not always reflect the real reality. This study attempts to analyze how *RMOL.co* framed the case of Romi's KPK capture through the use of Murray Adelman's model framing element analysis (categorization, ideology, rubric, and classification) as a tool for analyzing news texts on Romi's capture case. The results of the study indicate that reporting on *RMOL.co* tends to favor the disclosure of Romi's capture case. The prominence of *RMOL.co* over Romi's HCO case can be seen from the framing of the *RMOL.co* news which more highlights the negative side of Romi's HCO on the one hand, and the positive side of the KPK on the other, and the positive side of the KPK on the other, especially the performance of the KPK and Prabowo-Sandi's BPN camp in relation to the KPK HCO to the political elite who have often taken refuge behind the curtain of power.

Keywords: framing analysis, political actor, hand catch operation, political corruption.

Pendahuluan

Publik nasional tersentak dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Romahurmuziy (alias Romi), Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang juga Anggota Dewan Penasehat Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin. OTT KPK terhadap Ketua Umum PPP ini telah menepis asumsi negatif publik yang selama ini menganggap KPK 'tebang pilih' terhadap target operasinya. Pasalnya, OTT KPK terhadap Romi—figur kunci dalam lingkaran inti kekuasaan—justru terjadi pada *timing* yang secara politik cukup krusial, yakni menjelang pemilihan presiden yang akan digelar pada 17 April 2019.

Romi ditangkap petugas KPK pada Jumat, 15 Maret 2019. Penangkapan Romi terkait pengisian jabatan di lingkungan birokrasi Kementerian Agama (Kemenag). KPK menyebut, OTT Romi kali ini melibatkan banyak pihak, mulai dari anggota DPR, pejabat di Kemenag, dan pihak swasta ([https:// www.cnnindonesia.com/nasional/kpk-soal-ott-romi-diduga-bukan-transaksi-pertama-kali](https://www.cnnindonesia.com/nasional/kpk-soal-ott-romi-diduga-bukan-transaksi-pertama-kali)). Menurut Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif, penangkapan Romi lebih tepat diduga bersama-sama dengan pihak Kemenag menerima suap untuk mempengaruhi hasil seleksi dan promosi jabatan pimpinan tinggi di instansi itu". Sebab, OTT ini merupakan rangkaian (suap) untuk (menentukan) posisi Kepala Kantor Wilayah Kemenag Kabupaten Gresik dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Rincian kronologi OTT KPK diawali saat tim KPK mendapat informasi, bahwa sekitar pukul tujuh pagi akan ada penyerahan uang dari Muafaq Wirahadi (Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik) ke Romi di Hotel Bumi Hyatt Surabaya, Jawa Timur. Setelah tim KPK mendapatkan bukti penyerahan uang, pukul 07.35, Muafaq dan sopirnya (yang berinisial S), ditangkap. Dari sana, penyidik KPK mengamankan uang sejumlah Rp 17,7 juta yang dibungkus dalam amplop putih (<https://tirto.id/kronologi-lengkap-ott-ketua-ppp-romahurmuziy-oleh-kpk-djDX>).

Selanjutnya, KPK kembali menangkap Amin Nuryadi (asisten Romi) yang tengah memegang tas kertas berlogo salah satu bank pemerintah. Di dalam tas kertas tersebut terdapat uang sejumlah Rp 50 juta. Penyidik juga mengamankan uang sebesar Rp 70,2 juta. Total uang yang diamankan KPK dari Amin Nuryadi berjumlah Rp 120,2 juta. Pada pukul 07.50, penyidik KPK berhasil menangkap Romi di tempat yang sama. Beberapa menit setelahnya—sekitar pukul 08.40—penyidik KPK juga berhasil menangkap Haris Hasanuddin

(Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jatim). Dari rangkaian penangkapan tersebut, KPK kembali berhasil mengamankan uang Rp 18,85 juta.

Dalam konstruksi perkara, KPK menduga Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin menghubungi Romi untuk mengurus seleksi jabatan di Kemenag. Untuk Muafaq terkait dengan posisi Kakanwil Kemenag Kabupaten Gresik, sementara Haris untuk posisi Kakanwil Kemenag Jawa Timur. Pada 6 Februari 2019 diduga Muafaq dan Haris mendatangi rumah Romi dan menyerahkan uang sebesar Rp 250 juta—dana awal—agar dapat menduduki posisi itu.

Menurut keterangan pimpinan KPK, Laode M. Syarif, Romi dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat 1 KUHP. Sementara Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin akan dijerat dengan Pasal 5 ayat huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

OTT yang dilakukan KPK terhadap Romi, pejabat kantor wilayah, dan sejumlah orang tersebut merupakan bentuk tindakan pencegahan/antisipasi KPK dalam mendeteksi modus korupsi politik yang kerap digunakan para politisi (elite politik), pejabat (birokrat), dan pengusaha hitam. Penangkapan Romi merupakan prestasi kesekian kali yang diukir KPK dari puluhan OTT bermodus korupsi politik, sejak lembaga ini berdiri pada tahun 2002.

Menurut Lubis dan Scott (1995), korupsi bisa diartikan sebagai penggunaan secara diam-diam kekuasaan yang dialihkan berdasarkan wewenang yang melekat pada kekuasaan itu atau berdasarkan kemampuan formal, yang bertujuan merugikan kekuasaan yang sah dan menguntungkan orang luar atas dalih menggunakan kekuasaan itu dengan sah. Sementara menurut Robert Klitgaard (2000), korupsi politik bisa berarti menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi.

Dalam definisi *International Dictionary* (<https://definitions.uslegal.com/p/political-corruption/>), korupsi politik adalah penyalahgunaan kekuasaan politik yang dilakukan oleh pemimpin (birokrat, elite politik, dan *interest group* yang dekat/berada dilingkaran inti kekuasaan) untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau tindakan untuk mempertahankan kekuasaan. Korupsi politik terjadi pada level tertinggi dalam suatu sistem politik atau struktur kekuasaan, dan kerap berkelindan dengan korupsi administrasi dan korupsi birokrasi; bahkan dengan korupsi sektor bisnis atau sektor privat.

Korupsi politik (secara umum) dapat terjadi dalam dua bentuk. *Pertama*, akumulasi dan ekstraksi dimana elite politik/pejabat pemerintah menggunakan dan menyalahgunakan kekuasaan yang ada ditangannya untuk mendapatkan keuntungan dari sektor privat, dari

pajak pemerintah, dan dari sumber ekonomi secara besar-besaran (contohnya adalah *rent-seeking* di mana para calon pemimpin mencari modal keterpilihannya melalui janji pemberian proyek tertentu kepada pemodal politiknya ketika dia menjabat). *Kedua*, mengambil keuntungan dari sumber-sumber tertentu, seperti pengumpulan dana publik guna menyelamatkan, memperkuat, dan melanggengkan kekuasaannya. Strategi ini biasanya dilakukan dengan memberikan dukungan dan patronase (perlindungan) politik kepada kelompok tertentu, termasuk distribusi keuangan dan material (*project*) yang memberikan manfaat atau keuntungan kepada pihak tertentu (Suwarni, 2018).

Di level kepala daerah, mengutip catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), sepanjang tahun 2010-2017 tak kurang dari 215 kepala daerah yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi (tipikor) bernuansa politik, baik yang kasusnya ditangani langsung oleh KPK maupun oleh kepolisian atau kejaksaan. Kasus-kasus tipikor tersebut terjadi dengan beragam pola dan modus, seperti permainan anggaran proyek, suap pengesahan anggaran, korupsi pengadaan barang dan jasa, suap perzinan, hingga suap penanganan perkara. Angka korupsi yang dilakukan oleh para kepala daerah ini merupakan angka yang tinggi dan mengkhawatirkan (https://antikorupsi.org/sites/default/files/outlook_korupsi_politik_2018_110118.pdf).

Jumlah kasus korupsi di atas menggambarkan bahwa sistem demokrasi tidak berjalan efektif dan senafas dengan tumbuhnya kesadaran hukum pada diri aktor/elite politik, pejabat/birokrat, dan para aktor korporasi (pelaku bisnis). Ironisnya, para aktor/elite politik, pemangku kekuasaan, dan elite korporasi/bisnis bahkan menjadi entitas yang tak pernah absen dalam memainkan drama korupsi politik yang terus berlangsung dramatis di negeri ini. Mengacu pada hasil studi ICW, korupsi politik diantaranya disebabkan oleh besarnya investasi dana kampanye sebagai penyebab para politisi, kepala daerah, dan anggota legislatif terlibat dalam rangkaian kasus korupsi politik—akibat mahalannya ongkos pemenangan kompetisi dalam kontestasi politik sistem demokrasi langsung (*direct democracy*) saat ini yang investasi atau mahar politiknya sangat mahal (*high cost politics*) (https://antikorupsi.org/sites/default/files/outlook_korupsi_politik_2018_110118.pdf).

Fenomena OTT pada para pelaku korupsi politik, pada satu sisi tentu saja menjadi kontroversi bagi para koruptor yang selalu mengandalkan patronase politik atau berlindung dibalik dinding tebal kekuasaan. Namun, pada sisi lain OTT KPK pada para koruptor selalu mendapat dukungan, simpati, dan apresiasi publik saat KPK berhasil membongkar kasus korupsi politik. Sebab, masyarakat selama ini telah begitu geram dengan perilaku koruptif, kolusif, dan nepotik para penguasa-pengusaha yang terus mencuri uang negara—sebagai

dampak dari pemberitaan media yang gencar dan sukses meliput, menginvestigasi, dan *blow up* isu korupsi politik sebagai *headline* atau *hot news*-nya.

Sebagai realitas politik dan fakta hukum yang menarik bagi media massa untuk diberitakan, OTT KPK terhadap praktik korupsi politik yang umumnya melibatkan politisi, pejabat/birokrat, dan pengusaha tentu terkait dengan nilai berita (*news value*), baik ditinjau dari sisi tampilan isi (*content*)-nya, dari sisi person (aktor/pelaku)-nya maupun dari sisi jabatan/kedudukan yang diembannya (*prominence, eminence*)-nya, termasuk dari sisi *material-event* atau sifat kekhususan kasusnya (*extraordinary*) serta dari sisi bencana (*disaster*) kriminalitas yang dihasilkannya—yakni bentuk penyalahgunaan jabatan, kewenangan, dan kekuasaan dalam praktik kekuasaan negara.

Terkait kajian kasus OTT KPK atas Romi, analisis akan diarahkan pada bagaimana RMOL.co mem-framing kasus tersebut, yakni mengungkap OTT KPK dengan menelisik penyajian teks berita dari elemen *kategorisasi, ideologi, rubrikasi, dan klasifikasi*. Sebab, framing berita potensial melihat, memahami, memaknai, dan melegitimasi pemahaman dari perspektif atau posisi tertentu—melalui penggunaan kata, kalimat, gaya bahasa atau cara bercerita—dari masing-masing individu/kelompok yang direpresentasikan dalam pemberitaan oleh media.

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa hal penting berikut: (1) memeriksa unsur framing dalam teks berita atau wacana yang disajikan pemberitaan RMOL.co terkait kasus OTT KPK atas Romi dilihat dari keempat elemen framing Edelman (*kategorisasi, ideologi, rubrikasi, dan klasifikasi*); (2) menyingkap makna bahasa dalam praktik bentuk wacana yang bersemayam dalam elemen *kategorisasi, ideologi, rubrikasi, dan klasifikasi*; (3) melihat adanya relasi konstruksi kasus OTT Romi dengan konteks sosial budaya tempat wacana (teks berita) di produksi; (4) menelaah penggunaan pilihan kata, kalimat, istilah, kosa kata, dan gaya bahasa tertentu yang digunakan untuk mengungkap framing seperti apa yang melatari dan ingin dikonstruksi oleh sebuah teks berita terkait kasus OTT Romi sebagai wujud dari penggunaan bahasa (praktik wacana) yang disajikan RMOL.co; dan (5) elemen bahasa yang hendak dikaji dalam penelitian framing model Edelman ini meliputi: *kategorisasi* (frame yang digunakan untuk melihat sebuah peristiwa), *ideologi* (penggunaan bahasa, kata, kalimat, wacana, dengan tujuan/kepentingan tertentu), *rubrikasi* (bagaimana suatu peristiwa dikategorisasikan dalam skema peristiwa tertentu), dan *klasifikasi* (bagaimana suatu peristiwa dipahami dan dikomunikasikan).

Mengacu fenomena pemberitaan OTT kasus korupsi Romahurmuzyi alias Romi seperti telah dielaborasi di atas, maka framing pemberitaan mengenai OTT KPK atas Romi tentu

menarik untuk dikaji. Peneliti mengamati dalam konstruksi framing pemberitaan OTT KPK atas Romi ini terdapat empat faktor yang mampu merangsang perhatian khalayak terkait isu tersebut: (1) ketepatan waktu (*timeliness*), (2) kedekatan tempat kejadian (*proximity*), (3) besarnya isu (*size*), dan (4) latar kepentingan yang menyertainya (*importance*) (Fraser Bond, 1961; Tamburaka, 2012).

Adapun pemilihan RMOL.co sebagai objek kajian setidaknya dilatari oleh tiga alasan berikut. Pertama, RMOL.co adalah salah satu situs berita yang cukup konsen memberitakan isu-isu yang terkait dengan perilaku aktor politik dan para elite kekuasaan, terutama menyangkut isu penyalahgunaan kekuasaan politik dan pelanggaran hukum. Kedua, dengan motto "*Political News Leader*," RMOL.co berupaya memosisikan dirinya sebagai media berita garda depan yang berani mengulas secara lugas, akurat, dan kritis isu-isu politik 'sensitif' (seperti isu korupsi politik yang diinisiasi para aktor/elite politik) yang pemberitaannya cenderung dihindari oleh media lain. Ketiga, RMOL.co adalah media berita yang memiliki visi pemberitaan yang cenderung berpihak pada kepentingan publik.

Penelitian ini ditujukan untuk menjawab beberapa persoalan berikut: (1) bagaimana RMOL.co menempatkan kasus OTT KPK Romi dalam pemberitaannya (siapa yang menjadi narasumber berita, pernyataan apa yang ditonjolkan?); (2) bagaimana konstruksi teks berita ditinjau dari penggunaan perangkat bahasa (siapa aktor yang mendapat legitimasi positif/negatif, siapa aktor yang perannya ditonjolkan, disamarkan, dikucilkan, bahkan dihilangkan?); (3) mendeskripsikan bagaimana kasus OTT KPK Romi ditempatkan dalam konstruksi berita RMOL.co serta penggunaan bahasa dan simbol (pemaknaan) politik seperti apa yang digunakan RMOL.co dalam penyusunan fakta berita OTT KPK atas Romi selaku aktor politik. Ketiga pertanyaan yang menjadi tujuan penelitian di atas akan dianalisis dengan menggunakan konsep framing model Murray Adelman (*kategorisasi, ideologi, rubrikasi, dan klasifikasi*). Untuk menghasilkan pemahaman yang lebih utuh, analisis atas fenomena korupsi politik kasus OTT KPK atas Romi juga akan melibatkan asumsi-asumsi teoritik dari teori aktor politik, teori institusi, dan konsep *regain of public trust*. Perangkat analisis yang digunakan untuk menjelaskan pertanyaan di atas mengacu pada paradigma konstruktivis dengan jenis pendekatan penelitian kualitatif bersifat deskriptif-interpretif.

Ditinjau dari sisi kegunaan teoritis, hasil kajian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengayaan analisis framing berbasis paradigma konstruksionis, utamanya konstruksi pemberitaan atas kasus korupsi politik yang dilakukan para elite politik atau pejabat negara. Sementara dari sisi kegunaan praktis, hasil kajian ini diharapkan dapat memberi kontribusi praktis bagi wartawan dan para pemilik/pengelola media agar senantiasa menjaga

independensi, sikap kritis, objektif, dan edukatif dalam penyajian berita mengingat posisi media massa sangat strategis dalam mewarnai penegakan hukum, peningkatan kualitas demokrasi, dan literasi politik publik; terutama terkait fungsi media sebagai pengawas (*watch dog*) dan pilar keempat demokrasi (*the fourth estate*).

Untuk memosisikan *state of the art*, penelitian ini akan mengelaborasi penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya. Pertama, penelitian Sanhari Prawiradiredja (“Analisis Pemberitaan Operasi Tangkap Tangan KPK, 2017),” yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis framing model Pan-Kosicki. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketiga surat kabar sampel (*Koran Sindo*, *Kompas*, dan *Surya*) menggunakan framing berbeda dalam pemberitaan OTT KPK yang dilakukan oleh para politisi dan pejabat daerah terkait kasus tindak pidana korupsi tahun 2017. *Koran Sindo* lebih memilih penyajian berita dengan model *report* dalam pemberitaan OTT KPK terhadap empat pejabat di Kota Mojokerto, Jawa Timur. *Kompas* lebih memilih penyajian berita jenis investigasi (pengamatan dan wawancara dengan menonjolkan ultimatum KPK kepada para pejabat pemerintah daerah dalam penggunaan APBD). Sementara harian *Surya* lebih memilih jenis penyajian berita dengan pendekatan humanis (menonjolkan sisi kemanusiaan para pejabat dan elite daerah yang terjerat kasus OTT KPK).

Kedua, penelitian Donix Kurniawan Affinanto (“Pembingkai Berita Kasus Suap Patrialis Akbar di Harian *Kompas*, 2017).” Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini mendeskripsikan framing pemberitaan kasus suap yang menjerat Patrialis Akbar (PA) selaku Hakim Agung MK di *Kompas* edisi Januari–Februari 2017. Teknik analisis yang digunakan adalah framing model Robert Entman melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan, dalam pemberitaannya *Kompas* lebih memberi penekanan pada kasus suap PA yang berdampak signifikan pada pemburuan citra MK di mata publik (*define of problems*). Sumber masalah (*diagnose cause*) adalah orang-orang yang terlibat dengan PA. PA tidak amanah dalam mengemban kepercayaan yang diberikan pemerintah dan masyarakat (*moral judgement*). Adapun solusi (*treatment recommendation*) yang diberikan *Kompas* adalah mendukung pemerintah dan KPK untuk memproses kasus tersebut sampai tuntas; selain memberikan masukan berupa perbaikan sistem dan perbuahan prosedur aturan birokrasi ditubuh MK untuk lebih selektif memilih hakim konstitusi.

Ketiga, penelitian Dila Novita (“Konstruksi Media dalam Memberitakan Politisi Perempuan yang Terlibat Korupsi: Analisis Framing Kritis Pemberitaan Harian Umum *Kompas* Terhadap Kasus Korupsi Angelina Sondakh, 2016).” Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis teks dengan metode analisis framing Robert Etnman dan teknik

pengumpulan data wawancara mendalam (yang dikombinasi dengan teori kritis feminisme radikal Kate Millet). Penelitian ini ditujukan untuk melihat bagaimana harian *Kompas* melakukan framing terkait pemberitaan kasus korupsi Angelina Sondakh (Angie). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberitaan *Kompas* terkait kasus korupsi Angie tidak solid dan tidak komprehensif, karena menempatkan Angie sebagai aktor tunggal, bukan sebagai korban dari budaya patriarkal yang bias gender. Pemberitaan *Kompas* lebih banyak menonjolkan sisi feminin Angie sebagai sosok wanita yang lemah, bukan sebagai korban politik partiarki. Angie (dengan latar pendidikan S2 komunikasi), dianggap gagal dalam memberi keteladanan (integritas diri) selaku ‘orang terdidik’ yang duduk sebagai wakil rakyat di parlemen. Secara keseluruhan, framing berita *Kompas* lebih banyak menonjolkan sisi personal Angie—di luar substansi persoalan korupsi yang membelitnya—dengan mengeksploitasi sisi feminim untuk membuat daya tarik berita dengan mengaburkan substansi kasus hukum Angie (delik tindak pidana korupsi).

Keempat, penelitian Sacandra Aji Rivaldi (“Korupsi dalam Konstruksi Media: Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Korupsi di Televisi Swasta Nasional *Tv One* dan *Kompas Tv*, 2017).” Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji aspek makrostruktur, superstruktur, dan mikrostruktur terkait wacana pemberitaan korupsi di *TV One* dan *Kompas TV* menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif analisis wacana kritis Teun van Dijk. Pengumpulan data dilakukan dengan metode simak dan cakap dengan teknik lanjutan simak bebas libat cakap, teknik rekam, teknik catat, dan teknik cakap semuka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada analisis struktur teks level makrostruktur menonjolkan topik korupsi pada bagian awal pemberitaan sebagai strategi *TV One* dan *Kompas TV* untuk menarik minat pemirsa; pada level superstruktur, *TV One* dan *Kompas TV* menggambarkan kecenderungan pola struktur piramida terbalik pemberitaan yang terdiri dari judul, *lead* (intisari berita), dan tubuh berita; pada level mikrostruktur *TV One* sangat minim menggunakan metafora, sementara *Kompas TV* cenderung menggunakan metafora pada pemberitaan korupsi (seperti ‘uang panas’, ‘penggelapan dana’, ‘uang haram’, ‘uang pelicin’, dan ‘dalang’). Hal ini dilakukan sebagai strategi konstruksi wacana kasus korupsi sehingga bermakna ganda (konotatif). Pada level analisis kognisi sosial, *TV One* menggunakan skema person, skema diri, skema peran, dan skema peristiwa dalam mengonstruksi wacana berita korupsi. Penggunaan skema didasarkan pada keutamaan nilai berita, agar pemirsa meyakini bahwa wacana berita tersebut valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan *Kompas TV* menggunakan skema persona, skema diri, skema peran, dan skema peristiwa. Penggunaan skema tersebut didasarkan pada ideologi media massa tersebut, yakni ‘teguh dalam prinsip lentur dengan

cara'. Selanjutnya, pada level dimensi konteks sosial, dalam mengonstruksi wacana korupsi, *TV One* memberi akses wacana yang lebih besar pada KPK ketimbang pihak koruptor, berupa akses perencanaan, akses *setting*, dan akses kontrol wacana kepada pemirsa. Hal ini dimaksudkan agar wacana yang disampaikan dapat diterima dengan wajar oleh pemirsa. Sementara *Kompas TV* cenderung memberi ruang lebih luas dan menonjolkan peran KPK dalam pemberitaan, sehingga terjadi *gap* dalam konstruksi wacana secara seimbang (*discourse unbalance*).

Ditinjau dari sisi kebaruan kajian, analisis dalam studi ini memiliki perbedaan terkait sudut pandang yang digunakan dengan studi sebelumnya. Studi ini mencoba melihat konstruksi media atas isu korupsi politik tidak semata dilatari oleh analisis framing media (dengan latar belakang visi, misi, kepentingan dan ideologi yang melatarinya), namun mencoba mengaitkan fenomena korupsi politik yang menjadi fokus kajian sebagai produk kekuasaan; dan relasinya dengan teori aktor politik, teori institusional, dan konsep *regain public trust on publik institutions* dari Shane Snow (2017). Tujuan studi adalah untuk melihat adanya keterkaitan teoritis antara konsep framing (konstruksi) media dan korupsi politik (sebagai produk kekuasaan), dengan perilaku koruptif para aktor/elite politik serta upaya KPK sebagai institusi publik yang tengah bangkit untuk meraih kembali kepercayaan publik.

Teori Framing

Konsep framing adalah salah satu metode analisis media, seperti halnya analisis wacana, analisis teks, analisis isi (kualitatif), analisis semiotik, analisis naratif, dan jenis-jenis analisis interpretif media lainnya. Menurut Eriyanto (2011), analisis framing adalah sebuah teknik analisis yang mencoba melihat proses membingkai sebuah peristiwa yang digunakan oleh wartawan/media; atau cara untuk mengetahui bagaimana cara pandang digunakan wartawan/media ketika mengemas isi berita: sisi mana yang dihilangkan/dikaburkan; sisi mana yang akan ditonjolkan atau menjadi penekanan.

Sementara menurut Sobur (2015), framing adalah analisis untuk melihat perspektif yang digunakan wartawan dalam menyeleksi isu dan menulis berita. Framing merupakan teknik penyajian realitas, dimana kebenaran realitas yang diberitakan media tidak diingkari secara total, melainkan dibelokkan secara halus, dengan memberi penonjolan (*salience*) dan seleksi (*selection*) dalam penulisan berita. Framing membutuhkan strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta logika ke dalam berita, agar berita terlihat lebih bermakna, menarik, dan mudah diingat. Tujuannya untuk menggiring interpretasi khalayak. Melalui framing berita, khalayak dipersepsi akan lebih mudah mengerti/memahami arah isu dalam pemberitaan

media. Menurut Frank D. Durham (1988), framing sesungguhnya akan membuat dunia lebih mudah untuk diketahui dan dimengerti (Eriyanto, 2011).

Analisis framing dalam kajian media umumnya digunakan untuk melihat konstruksi atas framing realitas (peristiwa, individu, kelompok, dan lainnya) yang dilakukan oleh media massa dengan tujuan, motif atau maksud tertentu. Framing merupakan proses konstruksi (yang melibatkan subjektivitas wartawan), dimana realitas dimaknai dan direkonstruksi dengan cara dan makna tertentu. Akibatnya, framing berita hanya akan menonjolkan bagian tertentu saja yang lebih bermakna, lebih diperhatikan, lebih penting, dan dianggap lebih mengena untuk ditembakkan ke dalam pikiran khalayak.

Setidaknya terdapat tiga konsep dalam framing berita. Pertama, sebagai *seleksi isu dan penekanan isu*. Dalam konteks ini, framing berusaha untuk mengingatkan adanya bagian tertentu dari realitas yang lebih menonjol dan lebih dikenal. Penyajian berita dilakukan dengan menekankan pada bagian tertentu, menonjolkan aspek tertentu, dan membesarkan isu dengan cara bercerita tertentu dari suatu realitas/peristiwa yang ingin diframing atau dikonstruksi media (Eriyanto, 2011),

Kedua, dimensi *sosiologi-psikologi*. Seperti dijelaskan Erving Goffman, manusia pada dasarnya adalah makhluk yang secara aktif mengklasifikasi dan mengategorisasi pengalaman hidupnya—dalam relasinya dengan lingkungan sosiokulturalnya—agar kehidupannya memiliki arti dan makna. Sebab, secara psikologis manusia cenderung menyederhanakan realitas/dunia sosiokulturalnya yang rumit dan kompleks itu agar realitas/dunia sosiokulturalnya yang dipahami dan dimaknai itu memiliki perspektif dan dimensi tertentu (Eriyanto, 2011).

Ketiga, *frame dan realitas*. Konsep ketiga ini bisa memberi gambaran, bahwa suatu realitas/dunia yang terjadi sesungguhnya tidak dinarasikan secara alami, namun telah mengalami proses pembingkaihan (framing) terlebih dahulu. Apa yang kita tahu tentang realitas/dunia pada dasarnya bergantung pada bagaimana kita memahami frame yang melatari peristiwa dalam realitas/dunia itu. Peta framing membantu kita untuk melihat secara kritis bagaimana suatu peristiwa (yang kita amati) itu dikemas secara berbeda (*packaged differently*) oleh wartawan sehingga menghasilkan berita—yang dilihat dari sudut pandang atau perspektif—yang berbeda (Eriyanto, 2011).

Teori Aktor Politik

Ditelaah dari teori aktor politik dan relasinya dengan framing media, Romi adalah aktor politik yang memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan dan secara aktif bersaing dan bertarung untuk memerebutkan makna politik yang bisa diraihinya. Sementara media dilihat

sebagai entitas yang berperan dalam menyebarkan frame atas peristiwa politik, sehingga pemaknaan dari peristiwa politik yang dihadapi para aktor politik bisa tersebar luas—dan memberi *impact*—dalam kehidupan politik publik. Di sisi lain, elemen khalayak (pembaca) berkaitan dengan sumber dukungan bagi pembentukan opini publik atas perilaku aktor politik. Studi Jamil (2014) menunjukkan relasi antara elemen aktor politik, peran media, dan posisi khalayak yang banyak digunakan para ahli untuk melihat adanya relasi ketiga elemen sebagai satu kesatuan dalam konteks ‘perebutan makna’ atau ‘pembentukan opini publik’ yang berlangsung di ruang pemberitaan media.

Atau secara sederhana bisa dikatakan: setiap aktivitas aktor politik—dalam kerangka media—memengaruhi opini publik, dan berikutnya opini publik akan memengaruhi persepsi khalayak (selaku warga negara maupun konstituen). Studi Jamil (2014) juga menyimpulkan ketiga elemen (aktor politik, media, dan khalayak) tidak melulu harus dilihat secara linear, namun masing-masing elemen itu (aktor politik, media, dan khalayak) pada dasarnya bisa berperan—sekaligus juga bisa saling memengaruhi—sebagai subjek otonom yang memiliki pemahaman, penafsiran, dan pemaknaan berbeda atas isu politik tertentu yang melibatkan para aktor politik yang secara kontinyu menghadapi konstruksi citra dirinya (cara berpikir, orientasi, sikap, dan perilaku) di ruang pemberitaan media.

Frame atas suatu isu/peristiwa/realitas politik adalah hasil konstruksi yang dilakukan media yang bersumber dari aktivitas/perilaku para aktor politik. Frame yang muncul atas suatu peristiwa politik tidak dipahami sebagai proses alamiah, tetapi dilihat sebagai proses pembingkaihan strategis (*strategic frame*), yakni terkonstruksinya frame sebagai dampak dari pemberitaan media dan relasinya dengan aktivitas politik yang beragam, dinamis dan saling memengaruhi di antara (para) aktor politik, media, dan khalayak. Artinya, proses framing media tentu tidak berjalan linear, karena saat media membentuk *strategic frame* atas pemberitaan dari aktivitas aktor politik tertentu, para aktor politik sesungguhnya juga memanfaatkan *strategic frame* yang dikonstruksi media tidak hanya dalam rangka memengaruhi, namun juga menggiring pemikiran yang berkembang dalam benak khalayak.

Teori Institusi Publik dan *Regain of Public Trust Concept*

Teori institusional (*institutional theory*) berasumsi bahwa institusi bertindak sesuai dengan tujuan dan kepentingan terbaiknya—sebagaimana agen (aktor/individu) melakukan tindakan untuk kepentingan terbaik dirinya. Asumsi teori ini juga melihat prediktabilitas dan kepentingan kehidupan kelompok sebagai alasan untuk merubah motivasi, dari motivasi kepentingan agensi (aktor/individu) ke motivasi kepentingan institusional (DiMaggio dan Powell, 1988). Shane Snow dalam *Why Major Institutions Lost Public Trust, and How They*

Can Gain It Back (2017), menjelaskan bahwa institusi publik yang tengah mengalami kehilangan kepercayaan publik (*public distrust*)—seperti KPK—adalah fenomena yang banyak terjadi di berbagai tempat. Bahkan menurut Snow, sejak tahun 1958, terdapat tren di mana institusi publik di berbagai negara demokrasi menghadapi wabah *public distrust*. Jika kepercayaan publik atas institusi mengalami penurunan, maka pandangan disfungsi atas institusi akan selalu melekat dan sulit untuk kembali pulih.

Snow (2017) menekankan bahwa di era modern yang telah mengalami perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, institusi memiliki kesempatan yang luas untuk mengembalikan *public trust* tersebut. Snow menyoroti pentingnya peran pers atau media massa dalam menyebarkan kinerja dari institusi tersebut. Bagi Snow, di dalam negara yang menganut sistem politik demokrasi—seperti Indonesia—penting untuk memosisikan media masa sebagai institusi deseminasi informasi politik publik, khususnya terkait pengungkapan kasus-kasus sensitif seperti korupsi politik. Dengan kata lain, aksi pimpinan KPK yang terus mengungkap kasus korupsi politik melalui OTT Romi bisa menjadi bagian penting program institusi untuk meraih kembali kepercayaan publik (*regain of public trust*).

Hilang/melemahnya *public trust* atas institusi bisa disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah faktor persepsi publik yang menilai secara politis, misalnya, jika institusi KPK di era pemerintahan Joko Widodo sedang dilemahkan—utamanya terkait tindakan pemberantasan korupsi melalui OTT yang gencar dilakukan oleh KPK. Konteks persepsi publik ini menjadi menarik, karena menurut Snow (2017) terjadi kesenjangan relasi emosional antara publik dan institusi—dan untuk meraih kembali kepercayaan publik—perlu dibangun kembali hubungan saling percaya (*mutual trust*) antara publik dan institusi, atau sebaliknya (*regain public trust on public institutions*).

Mengutip Paul Zak dalam *The Neuroscience of Trust* (2017), kondisi *regain of public trust* dapat dilakukan melalui aktivitas atau perilaku yang dapat memproduksi *oxytocin*, yakni hormon yang diproduksi tubuh manusia di dalam otak. Produksi *oxytocin* adalah mekanisme yang dengannya manusia memutuskan bahwa institusi publik (seperti KPK misalnya), cukup aman untuk diajak bekerjasama atau dipercaya. Menurut Zak, semakin banyak kepercayaan yang diterima (oleh institusi) dari pengirim (media massa dan publik), maka semakin banyak produksi *oxytocin* yang dihasilkan oleh otak pengirim (persepsi publik dipancarkan media massa). Konteks ini relevan dengan kasus yang dihadapi oleh KPK yang saat ini tengah menghadapi problem *public distrust*.

Hasil survei LSI Denny JA, misalnya, merilis indikasi turunnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi KPK: dari 89 persen pada Juli 2018, menjadi 85,7 persen pada

September 2019 (<https://nasional.kompas.com/read/2019/11/15/03000061/angka-kepercayaan-publik-yang-menurun-jadi-pelecut-bagi-kpk>). Realitas ini bisa menjelaskan mengapa kasus OTT KPK atas Romi menjadi konstruksi berita RMOL.co, karena konstruksi berita seperti ini penting untuk *regain trust for public insitutions*, yakni mengembalikan rasa percaya publik pada KPK sebagai institusi penegak hukum.

Konsep Framing Edelman

Murray Jacob Edelman adalah seorang ilmuwan politik asal Amerika, yang dikenal luas karena hasil riset mutakhirnya tentang politik simbol dan psikologi politik dalam tulisannya: “*Contestable Categories and Public Oppinion*” (terbit di Jurnal *Political Communication*, Vol. 10, No. 3, Tahun 1993). Rraming Edelman terkait dengan penggunaan bahasa dan simbol politik dalam komunikasi. Dalam teorinya, Adelman memperkenalkan satu metode atau teknik baru dalam analisis framing berita. Menurut Edelman, dalam menganalisis sebuah teks berita, sebuah realitas/peristiwa dapat dibingkai sesuai dengan apa yang kita tafsirkan; karena realitas sosial potensial diubah dengan cara dimana pengamatan dibingkai dan dikategorikan. Sebuah realitas/peristiwa yang sama bisa saja menjadi berbeda ketika dibingkai dan dikategorikan secara berbeda (Edelman, 1993). Sebab, apa yang kita lihat, ketahui, fahami, dan maknai tentang suatu realitas/peristiwa tergantung dari bagaimana kita membingkai, mengontruksi, dan menafsirkan peristiwa/realitas tersebut (Eriyanto, 2011).

Dalam aplikasi, seringkali terjadi, saat media memberitakan realitas/peristiwa yang sama namun berbeda dalam melihat dan memaknai realitas/peristiwa itu, sehingga menghasilkan perbedaan dalam penyampaiannya—karena realitas yang dimaknai tersebut, baik secara simbolik maupun psikologis—telah tercampur dengan subjektivitas sebagai hasil pemaknaan (konstruksi) wartawan/redaktur saat realitas/peristiwa itu diliput, ditulis, dan disajikan dalam teks berita. Edelman menyebut proses ini sebagai framing, dan mensejajarkan konsep framing dengan apa yang dikenal sebagai ‘kategorisasi.’

Bagi Edelman, framing atau kategorisasi adalah fungsi abstraksi dari pikiran, yang membantu manusia (sebagai makhluk berpikir) untuk memahami realitas/peristiwa yang beragam, kompleks, dan rumit menjadi realitas/peristiwa yang lebih bermakna (Eriyanto, 2011). Edelman kemudian memperkenalkan empat metode, model atau teknik analisis untuk melihat secara lebih mendalam dan rinci bagaimana sebuah teks berita bekerja dalam ruang pemberitaan media, yakni melalui analisis *kategorisasi, ideologi, rubrikasi, dan klasifikasi*.

Kategorisasi. Dalam pandangan Edelman, kategori sangat membantu dalam merumuskan realitas yang dinamis, kompleks, rumit, dan tidak beraturan menjadi realitas yang sederhana, teratur, mudah dipahami, dan memiliki makna. Kategori (sebagai fungsi abstraksi dari pikiran

atau peta konsep yang ada di kepala manusia) adalah frame atau bingkai yang hampir selalu digunakan untuk melihat, memahami, dan memaknai sebuah peristiwa. Melalui kategorisasi, pikiran manusia secara spontan akan menggunakan perspektif tertentu untuk melihat, memahami, dan memaknai sebuah peristiwa. Kategorisasi berfungsi untuk mempengaruhi pikiran dan kesadaran individu untuk memahami realitas. Kategorisasi mampu mengantarkan individu kepada pengetahuan tentang bagaimana cara mendefinisikan masalah, membatasi ruang lingkup masalah, dan memberikan solusi efektif untuk merekomendasi atau mencari solusi atas penyelesaian suatu masalah (Eriyanto, 2011).

Ideologi. Menurut Edelman, kategorisasi berhubungan dengan ideologi. Penggunaan kategorisasi tertentu (seperti korupsi politik atau operasi tangkap tangan) tidak bisa dipahami semata-mata sebagai persoalan teknis kebahasaan, tetapi lebih dipahami sebagai masalah ideologi. Edelman yakin, khalayak hidup dalam dunia simbolik. Bahasa politik atau hukum yang dipakai dan dikomunikasikan kepada khalayak lewat media mempengaruhi pandangan khalayak dalam melihat dan memaknai realitas. Penggunaan kata-kata atau kalimat tertentu mempengaruhi bagaimana realitas atau seseorang dicitrakan dan pada akhirnya membentuk pendapat umum mengenai suatu peristiwa. Bahasa tertentu memperkuat pandangan seseorang, prasangka, dan kebencian tertentu (Eriyanto, 2011).

Teks berita tidaklah memiliki nilai tanpa merepresentasikan kepentingan, baik dari segi material maupun teknologi. Dari segi material, teks berita media merupakan hasil konstruksi, yang tampil dalam bentuk berita dan kumpulan simbol atau tanda yang berelasi satu sama lain. Dari segi ideologi, teks media merepresentasikan gagasan tertentu yang kemudian dimaknai oleh para pembacanya (khalayak). Dengan demikian, teks media diproduksi bukan tanpa alasan, mereka di konstruksi secara teknis dan ideologis untuk merepresentasikan gagasan tertentu kepada masyarakat (Burton, 2005).

Seperti Adelman dan Burton, Althusser (1970) juga memosisikan media massa sebagai institusi ideologis. Menurut Althusser, media massa—dengan segala kepentingan yang melekat padanya—selalu menjalankan misi ideologi tertentu dalam kaitannya sebagai sarana informasi dan komunikasi (sosial, budaya, politik) publik. Artinya, seluruh bahasa, teks, dan simbol yang digunakan media massa tak bisa dilepaskan dari kepentingan ideologi (Septya, 2007).

Rubrikasi. Salah satu aspek kategorisasi yang penting dalam pemberitaan adalah rubrikasi. Rubrikasi terkait dengan bagaimana suatu peristiwa (berita) dikategorisasikan dalam rubrik-rubrik tertentu (Eriyanto, 2011). Rubrikasi adalah perwujudan dari proses kategorisasi pikiran dalam pemberitaan; semacam teknik menempatkan berita

(peristiwa/realitas) dalam rubrik tertentu sesuai dengan kategori media. Bagi Edelman, rubrikasi sangat menentukan bagaimana sebuah peristiwa dijelaskan. Rubrikasi harus dipahami bukan semata sebagai persoalan teknis dari penempatan berita, akan tetapi harus dilihat bagaimana fakta berita diklasifikasi ke dalam kategori tertentu untuk membantu pembaca agar lebih mudah memahami suatu isu/peristiwa yang alur narasinya sudah dikonstruksikan oleh wartawan (Eriyanto, 2011).

Dalam penyusunan fakta dan penyajian berita, media biasanya menempatkan teks berita sesuai dengan tujuan tertentu, agar tidak terjadi kesalahan dalam pengkategorian berita. Salah satu teknik framing akan terlihat ketika media dengan sengaja menempatkan teks berita pada rubrik tertentu, yang dapat membuat persepsi khalayak mengikuti alur narasi yang disajikan media pada rubrik tertentu. Meski terlihat sepele, rubrikasi bagi Edelman memiliki dampak besar dalam membentuk persetujuan khalayak terhadap informasi, berita atau isu yang akan dinarasikan media.

Klasifikasi. Menurut Edelman, klasifikasi sangat menentukan terkait dukungan (*support*) atau ketidaksetujuan (oposisi) politik media atas satu isu atau peristiwa. Secara teknis, klasifikasi berhubungan dengan bagaimana suatu peristiwa dipahami dan dikomunikasikan. Klasifikasi menentukan dukungan (*support*) atau oposisi (*resistence*) pada publik. Hadirnya *support* atau resistensi publik atas suatu isu/peristiwa ditentukan oleh cara media menyajikan dan mengkomunikasikan suatu peristiwa kepada publik. Dalam proses menyajikan dan mengkomunikasikan peristiwa inilah kategorisasi dan klasifikasi bekerja dalam pikiran wartawan/media.

Klasifikasi tidak hanya berdampak mempengaruhi, akan tetapi menentukan emosi khalayak saat mereka melihat suatu isu atau peristiwa yang tengah dinarasikan media. Menurut Edelman, klasifikasi dan kategorisasi sangat berhubungan dengan bagaimana realitas dipahami dan dimengerti serta apa yang seharusnya ditekankan, ditonjolkan, disamarkan, atau dihilangkan pada khalayak dalam melihat suatu isu/peristiwa tertentu (Eriyanto, 2011).

Dengan demikian, analisis framing ingin menunjukkan, bahwa setiap berita pada dasarnya memiliki bingkai (frame) yang merupakan hasil konstruksi wartawan, redaksi atau media. Peristiwa/realitas yang sama bisa ditulis, dimaknai, dan disajikan dalam teks berita secara berbeda. Peristiwa OTT KPK terhadap Romi misalnya, bisa diberitakan secara berbeda oleh media, karena setiap media memiliki perspektif (bingkai/frame, konstruksi) yang berbeda.

Sebagai sebuah teknik bercerita (*story line*), frame adalah gugusan ide-ide yang tersusun sedemikian rupa secara sistematis dan menghadirkan konstruksi makna dari sebuah peristiwa/realitas; yang didalamnya memuat dua aspek penting: 'seleksi isu' dan 'penekanan isu'. Frame (melalui proses seleksi dan penekanan isu) itulah yang nantinya akan menentukan bagaimana peristiwa dilihat, siapa narasumber yang dikutip, bagian dari peristiwa apa yang ditonjolkan/ditekankan, dan bagian mana dari peristiwa yang disamarkan, dikucilkan, atau dihilangkan.

Konsep-konsep Teoritik

Korupsi Politik. Korupsi politik (*political corruption*) sesungguhnya produk dari lemahnya pengawasan hukum dan kontrol publik atas penyelenggaraan kekuasaan negara secara efektif. Lemahnya pengawasan institusi penegak hukum dan kontrol publik ini dapat ditimbulkan karena buruknya transparansi dan akuntabilitas pemerintah, kondisi sosial ekonomi dan pendidikan masyarakat yang tidak memadai, atau muncul karena praktek kekuasaan politik itu sendiri yang opresif dan menyimpang dari norma moral dan kaidah hukum yang adil. Keberadaan praktek kekuasaan yang korup dan opresif ini terselenggara akibat buruknya budaya politik; dimana budaya politik dikonstruksi sebagai sarana legitimasi sosial politik penguasa (Alkotsar, 2009).

Korupsi politik mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kekuasaan, karena aktor sentral dari korupsi politik adalah subjek hukum yang memiliki kekuasaan politik, menerima amanat dari rakyat, memiliki mandat konstitusional dan hukum untuk menegakkan demokrasi dan keadilan di berbagai aspek kehidupan dan penghidupan rakyat. Korupsi politik adalah bentuk penyalahgunaan amanat, mandat, dan kewenangan yang dipercayakan oleh rakyat selaku pemegang kekuasaan tertinggi, baik akibat adanya peluang dan kesempatan yang melekat dalam kedudukan dan posisi sosial politik yang melekat pada figur pemilik kekuasaan; yang akan berdampak secara sistemik pada bidang sosial, ekonomi, politik, hukum, dan pendidikan yang negatif bagi rakyat (Alkotsar, 2009).

Korupsi bisa dilatari oleh beragam motif: (1) penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara; (2) tindakan itu, sedari awal, dapat ditunjukkan dengan menggunakan pengaruh politik atau ekonomi; (3) sebagian uang dari hasil kejahatan itu dilakukan untuk kegiatan yang dikategorisir sebagai aktivitas politik; (4) adanya niat (motif) yang diwujudkan dalam bentuk tindakan atau perbuatan tertentu yang dapat dikualifikasi sebagai suatu 'kepentingan politik'; dan (5) interpretasi terhadap pengertian

politik, aktivitas politik, dan kepentingan yang ditafsirkan secara eksekutif di dalam berbagai pertimbangan hukum (Alkotsar, 2009).

Dalam setiap kasus korupsi politik, selalu ada peran korporasi yang dijadikan sarana dan objek kejahatan. Korporasi digunakan untuk melakukan kejahatan korupsi, yang bersekutu dengan pemegang otoritas politik (Widjojanto, 2017). Korupsi politik adalah bentuk kejahatan terorganisir yang potensial dilakukan secara solid dan terintegrasi antara kepentingan korporasi, birokrasi, dan politisi sehingga terjadilah suatu kejahatan korupsi terorganisir di sektor korporasi yang berkelindan dengan suatu kejahatan yang dapat dikualifikasi sebagai bentuk korupsi politik (Alkotsar, 2009).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK adalah lembaga khusus yang keberadaannya begitu dibutuhkan untuk menangani berbagai kasus tindak pidana korupsi yang kian terstruktur, massif, dan sistematis. KPK diberi amanat melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi secara profesional, intensif, dan kontinyu. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun (<http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk>).

Adapun tugas KPK yang adalah berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK); supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK; melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK; melakukan tindakan-tindakan pencegahan TPK; dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam pelaksanaannya tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada presiden, DPR, dan BPK (<http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk>).

Secara institusional dan struktural, KPK dipimpin oleh Pimpinan KPK yang terdiri dari lima orang komisioner: seorang ketua KPK merangkap anggota dan empat orang wakil ketua KPK merangkap anggota. Kelima pimpinan KPK tersebut merupakan pejabat negara, yang berasal dari unsur pemerintahan dan unsur masyarakat sipil. Pimpinan KPK memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam pengambilan keputusan dalam pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial (<http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk>).

Pimpinan KPK membawahi empat bidang, yang terdiri atas bidang Pencegahan, bidang Penindakan, bidang Informasi dan Data, serta bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat. Masing-masing bidang tersebut dipimpin oleh seorang deputi. KPK juga dibantu Sekretariat Jenderal yang dipimpin seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia, namun bertanggung jawab kepada pimpinan KPK. Ketentuan mengenai struktur organisasi KPK diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan masyarakat luas tetap dapat berpartisipasi dalam aktivitas dan langkah-langkah yang dilakukan KPK (<http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk>).

Operasi Tangkap Tangan (OTT). Istilah OTT tidak dikenal dalam KUHAP namun terdapat istilah ‘Penangkapan’ dan ‘Tertangkap Tangan’, seperti: (1) tertangkap tangan adalah “(individu atau kelompok yang) kedapatan waktu melakukan kejahatan atau perbuatan yang tidak boleh dilakukan, tertangkap basah” (KBBI, 2005); (2) tertangkap tangan sama dengan ‘*heterdaad*’ atau ‘kedapatan tengah berbuat; tertangkap basah’ pada waktu kejahatan tengah dilakukan atau tidak lama sesudah itu diketahui orang (Simorangkir, 1983); (3) penyidikan delik tertangkap tangan berasal dari Perancis, dimana sejak zaman Romawi telah dikenal delik tertangkap tangan, yaitu delik yang tertangkap sedang atau segera setelah berlangsung yang memiliki akibat-akibat hukum yang berbeda dengan delik lain (Sosrodanukusumo, 2005), dan (4) dalam delik tertangkap tangan disebut oleh orang: Romawi *delictum flagrans*; Jerman atau Belanda kuno *handhaft (ig) e daet* dan *versche daet*; Perancis *flagrant delit*; dan Jerman *frische tat* (Andi Hamzah, 2005).

Menurut Pasal 1 butir 19 KUHAP ‘tertangkap tangan’ didefinisikan sebagai: “*Tertangkapnya seseorang pada waktu melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu*” (Ramadhani, 2018).

Dari ketentuan pasal Pasal 1 butir 19 KUHAP di atas, terlihat adanya penjelasan yang lebih luas dan rinci tentang istilah ‘tertangkap tangan’ dengan memberikan klasifikasi khusus terkait unsur perbuatan tersebut yang dapat dilihat dari beberapa pengertian berikut: (a) sedang melakukan tindak pidana (perbuatan melawan hukum); (b) dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana (perbuatan melawan hukum) itu dilakukan; (c) sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya; atau (d) apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan

tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut membantu melakukan tindak pidana itu (Ramadhani, 2018).

Media Online. Media *online* adalah sarana komunikasi yang tersaji secara *online* di situs web (*website*) internet. Media *online* disebut juga media daring, media digital atau media siber (*cyber media*), yakni semua sarana atau saluran komunikasi yang ada di internet (yang hanya bisa diakses melalui koneksi) sebagai sarana (saluran) komunikasi secara *online*. Media online adalah media massa ‘generasi ketiga’ setelah media cetak (*printed media*, seperti koran, tabloid, majalah, buku) dan media elektronik (*electronic media*, seperti radio, televisi, dan film/video). Secara teknis atau fisik, media *online* adalah media berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet). Termasuk kategori media online adalah portal, *website* (*situs web*, termasuk blog dan media sosial seperti *facebook* dan *twitter*), *radio online*, *TV online*, dan email (Romli, 2012).

Media *online* juga kerap disetarakan dengan istilah ‘media sosial’ (*social media*) atau media daring (media yang beroperasi dalam jaringan internet), dimana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Media *online* (*social media*) merupakan produk jurnalistik online (*cyber journalism*) yang melakukan aktivitas jurnalistik melalui pelaporan fakta atau peristiwa yang diproduksi dan didistribusikan melalui internet. Secara teknis atau fisik, media *online* adalah media berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet). Termasuk dalam kategori media *online* adalah portal, *website* (situs web, termasuk blog), *radio online*, *TV online*, dan email. Sementara isi media *online* terdiri: teks, visual/gambar, audio, dan audio-visual (video) (Hardi, 2016).

Situs Web (Portal Berita). *Situs web* atau *website* yang menjadi pintu gerbang (*starting point*) bagi pengunjung untuk memulai aktivitasnya di internet. *Situs web* atau *Portal web* memiliki perangkat yang menyediakan kemampuan tertentu, yang dibuat sedemikian rupa untuk menuruti selera para pengunjungnya. Kemampuan portal *web* yang lebih spesifik adalah penyediaan kandungan (*content*) informasi atau berita yang dapat diakses menggunakan beragam perangkat teknologi informasi modern, seperti *personal computer* (PC), komputer jinjing (*notebook*), PDA (*Personal Digital Assistant*), atau telepon genggam (*hand phone*) (Hidayatullah, 2016).

Sementara portal berita *online* adalah bagian dari *web* portal. *Web* portal bisa berdiri sendiri atau merupakan konvergensi dari media cetak dan elektronik. Contohnya, *Tempo.co*, *Kompas.com*, dan *Republika.com* merupakan portal berita yang memiliki edisi cetak (*print edition*), seperti koran, tabloid, atau majalah. Sementara *Detik.com*, *Kapanlagi.com*, dan

RMOL.co adalah portal berita yang tidak memiliki edisi cetak. RMOL.co adalah sebuah portal *web* yang berisi berita dan artikel daring yang merupakan salah satu situs berita terpopuler di Indonesia. RMOL.co merupakan portal berita politik, sosial, ekonomi, dan hukum terdepan, aktual, dan berani melawan arus berita *mainstream*.

Metode Penelitian

Paradigma membantu untuk merumuskan apa yang harus dipelajari, suatu kesatuan konsensus terluas dalam suatu bidang ilmu pengetahuan, menyangkut aspek ontologi, epistemologi, metodologi, aksiologi, nilai, etika, tujuan penyelidikan, sifat pengetahuan, dan kualitas kriteria (Hidayat, 2002). Paradigma menggolongkan, mendefinisikan, dan menghubungkan antara teori, metode serta instrumen dalam satu kesatuan metodologis yang utuh (Ikbar, 2012).

Paradigma yang digunakan dalam kajian ini adalah paradigma konstruktivis (*constructivist paradigm*). Paradigma konstruksionis atau konstruksi sosial meyakini bahwa: (1) ilmu sosial adalah analisis sistematis terhadap ‘tindakan yang berarti secara sosial’ untuk menciptakan, memelihara, dan mengelola dunia sosial mereka secara bersama (Hidayat, 2003); (2) menekankan pada aksi sosial yang bermakna, dimana makna terbentuk secara sosial dan memiliki relativisme nilai (Neuman, 2016); (3) mempelajari beragam realitas sosial sebagai hasil konstruksi sosial individu serta implikasi dari hasil konstruksi realitas sosial tersebut bagi kehidupan sosial dan kultural mereka (Patton, 1990; Hidayat, 2003); (4) memahami individu sebagai aktor yang secara kontinyu memaknai dunia, membangun nilai bersama, dan berinteraksi secara sosial-kultural (Creswell, 2014); (5) menggunakan pendekatan subjektif, yakni melihat berbagai jenis pengonstruksian dan menformulasikannya ke dalam sebuah konsensus (Hidayat, 2003); (6) meyakini bahwa setiap individu atau kelompok memiliki sifat unik serta mampu memaknai/menafsirkan dunia berdasarkan subjektivitasnya (Creswell, 2014); (7) memandang dan memahami realitas sosial secara konstruksionis; yakni realitas sebagai hasil konstruksi sosial (Neuman, 2016); (8) memiliki pandangan, keyakinan, dan posisi tersendiri dalam memahami perilaku media dan teks berita (wacana) yang dihasilkannya (Eriyanto, 2011); (9) meyakini bahwa pekerjaan rutin media massa adalah mengonstruksikan realitas melalui praktik bahasa sebagai perangkat dasarnya (Tuchman, 1980; Sobur, 2014); (10) meyakini bahwa wacana berita tidak terbentuk secara alamiah, namun telah dipengaruhi oleh berbagai faktor (interaksi dan interrelasi) di antara aktor, institusi, dan nilai-nilai sosiokultural yang melingkupinya; serta meyakini bahwa dibalik sebuah teks berita (wacana) terdapat makna dan citra yang ingin dicapai serta kepentingan tersembunyi yang tengah diperjuangkan (Hamad, 2007).

Melalui penggunaan paradigma konstruksi sosial, kajian ini memfokuskan diri pada analisis teks berita kasus OTT KPK atas Romi ini diharapkan dapat menyibak framing pemberitaan melalui penggunaan bahasa dan simbol politik seperti apa yang dikonstruksi di ruang teks berita RMOL.co yang akan dikaji melalui analisis framing model Murray Edelman; dan kaitannya dengan fenomena korupsi politik (sebagai produk interaksi kekuasaan) dengan menyertakan analisis teori aktor politik, teori institusional, dan konsep *regain public trust on publik institutions* dari Snow (2017).

Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-interpretif dengan subjek analisis adalah teks berita RMOL.co (yang akan dideskripsikan terkait makna penggunaan bahasa, baik sebagai gejala sosiokultural maupun sebagai representasi ideologi kelompok dominan) ditujukan untuk mendapatkan deskripsi (gambaran) dan interpretasi (pemaknaan) kritis melalui analisis elemen *kategorisasi, ideologi, rubrikasi, dan klasifikasi* dalam penyusunan fakta berita yang di produksi.

Sementara pendekatan analisis interpretif memandang realitas sosial (teks berita) sebagai sesuatu yang dinamis dan subjektif. Tujuan analisis interpretif untuk menilai dan memaknai realitas sosial (teks berita) sebagai hasil konstruksi sosial (penafsiran wartawan dan/atau pemaknaan media), karena parspektif interpretif memandang wartawan adalah individu yang berkesadaran dan memiliki motif atau kepentingan dalam bertindak (Rahardjo, 2018).

Objek analisis adalah teks pemberitaan RMOL.co. Dari hasil amatan, terdapat 46 teks berita terkait pemberitaan kasus OTT Romi (rubrik Hukum, Politik, dan *Headline*), dan ada 4 teks opini publik (rubrik Publika) yang menyoroti kasus Romi seperti tersaji dalam pemberitaan RMOL.co. Dari 46 teks berita (di luar teks opini yang tersaji di rubik Publika), hanya 5 teks berita sampel yang dipilih secara purposif untuk dianalisis. Sumber data utama (teks berita) yang digunakan dalam penelitian ini adalah teks berita kasus OTT Romi oleh KPK yang tersaji sebagai teks berita di 3 (tiga) rubrik RMOL.co, yakni rubrik Politik, rubrik Hukum, dan rubrik *Headline* edisi Maret 2019.

Tabel 1.

Teks Berita Kasus OTT KPK atas Romahurmuziy di RMOL.co Edisi Maret 2019

Tanggal Terbit	Rubrik	Jam Terbit	Judul Berita
Jumat, 15 Maret 2019	Hukum	12:11	“Romahurmuziy Tengah Sarapan Saat Ditangkap”

Jumat, 15 Maret 2019	Hukum	13:17	“BPN Prabowo-Sandi Prihatin Penangkapan Romi”
Sabtu, 16 Maret 2019	Hukum	07:46	“Penangkapan Romi Bukti Kegagalan Jokowi”
Minggu, 17 Maret 2019	Politik	15:43	“OTT Romi Bukti Politisi Semakin Sakit”
Senin, 18 Maret 2019	Hukum	10:49	“Romi Pintu Masuk KPK ke Lingkaran Jokowi”

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Diawali dengan pengumpulan data primer (*primary-sources*) berupa teks berita portal berita RMOL.co. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasi dan dianalisis dengan teknik analisis kualitatif (deskriptif-interpretif). Sumber data lain yang digunakan adalah data sekunder (*secondary-sources*) seperti jurnal, buku, dan dokumen serta data tersier (*tertier-sources*), seperti di tulisan/kajian di *website*/internet yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Adapun teknik analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan dan klasifikasi data; identifikasi dan kategorisasi (pemilihan dan pemilahan) data yang akan disusun ke dalam satuan-satuan analisis; interpretasi dan analisis teks berita (elemen *kategorisasi*, *ideologi*, *rubrikasi*, dan *klasifikasi*); dan penarikan kesimpulan.

Pembahasan

Deskripsi Objek Kajian

Kantor Berita Politik *Rakyat Merdeka Online* (www.RMOL.co) didirikan pada 17 Agustus 2005, dan diverifikasi oleh Dewan Pers sebagai perusahaan pers profesional pada 9 Februari 2017 (SK Dewan Pers No. 74/DP-Terverifikasi/K/II/2017). Setelah diterbitkan oleh Rakyat Merdeka Group pada tahun 2005, (RMOL.co) sebagai edisi dalam jejaring (daring) telah berhasil merebut perhatian publik. Ini dibuktikan dengan 50 juta *klik* (kunjungan) per bulan. CEO sekaligus founder Kantor Berita Politik RMOL.co, adalah Teguh Santosa, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Ketua Bidang Urusan Internasional PWI (<https://rmol.co/mediakit/example-assets/books/mediakit>).

Secara historis, *Rakyat Merdeka Online* (RMOL.co) merupakan cikal bakal dari Harian *Rakyat Merdeka*. Harian ini memiliki sejarah yang cukup panjang, dimana berdirinya Harian *Rakyat Merdeka* ini ditandai dengan gesekan visi antara pemilik modal Surat Kabar Harian *Merdeka* dengan karyawan. Perbedaan inilah yang membuat hampir seluruh karyawannya

memutuskan untuk memisahkan diri dan berdiri sendiri membuat koran bernama *Rakyat Merdeka*. Karyawan *Rakyat Merdeka* dengan demikian adalah eks karyawan Surat Kabar Harian *Merdeka* yang memisahkan diri. Sejak peristiwa tersebut, Surat Kabar Harian *Rakyat Merdeka* terpisah secara struktural dan binsis dengan Surat Kabar Harian *Merdeka*.

Sejak berdiri pada tahun 1999, *Rakyat Merdeka* Group telah memiliki belasan media massa dan penerbitan, antara lain Harian *Rakyat Merdeka*, Lampu Hijau (sebelumnya bernama *Lampu Merah*), *Non Stop*, *Satelit News*, *Tangsel Pos*, *Majalah Biografi Politik Rakyat Merdeka*, *Loker*, *Tabloid Haji* dan *RM books*. Dan pada tahun 2002, slogan harian *Rakyat Merdeka* yang sebelumnya adalah "Apinya Demokrasi Indonesia" berubah menjadi "*Political News Leader*" yang mengandung arti bahwa koran ini ingin menjadi yang terdepan dalam berita politik. Selepas dari sejarah Surat Kabar Harian *Rakyat Merdeka* ini, pada tanggal 17 Agustus 2005 *Rakyat Merdeka* Group meluncurkan media daring *Rakyat Merdeka Online* (RMOL.co) (Fahmi, 2016).

Rakyat Merdeka Online (RMOL.co) adalah media massa (portal berita) berbasis internet yang berada di bawah payung kelompok media *Rakyat Merdeka* Group. Didirikan oleh dua jurnalis senior harian *Rakyat Merdeka*, H. Margiono dan Teguh Santosa. RMOL.co menampilkan informasi untuk kepentingan publik dengan lugas dan akurat, kritis sekaligus probisnis. RMOL.co memiliki jaringan (*network*) portal berita *online* di beberapa wilayah: RMOLJakarta.com, RMOLJabar.com, RMOLBengkulu.com, RMOLSumsel.com, RMOLKalbar.com, dan Medanbagus.com. Selain isu politik, RMOL.co juga menerbitkan berita hiburan dan olahraga. Rubrik yang ditawarkan sebagai bacaan publik juga bersifat variatif, seperti rubrik Dunia, rubrik Politik, rubrik Hukum, rubrik Keamanan, rubrik Properti, rubrik Ekbis, rubrik Olahraga, dan rubrik Otomotif (Fahmi, 2016).

Penyajian Data dan Analisis

Melalui analisis framing Edelman, kajian ini mencoba menjawab pertanyaan berikut: bagaimana RMOL.co menempatkan kasus OTT KPK Romi dalam pemberitaannya? Siapa aktor yang dijadikan sumber berita? Pernyataan/*statement* apa yang ditonjolkan RMOL.co dari sumber berita tersebut? Bagaimana RMOL.co menggunakan bahasa (pilihan kata/gaya bahasa) dalam pemberitaan? siapa aktor yang mendapatkan legitimasi dan delegitimasi dalam pemberitaan? siapa aktor yang perannya disamarkan, dikucilkan, bahkan dihilangkan dalam pemberitaan?

Tabel 2.

Framing Berita 1: “Romahurmuziy Tengah Sarapan Saat Ditangkap”

<i>Kategorisasi</i>	<p>“Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) di Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (15/3).” (p1)</p> <p>“Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Polisi Frans Barung Mangera, membenarkan konfirmasi penangkapan tersebut.” (p5)</p> <p>“Ketua KPK, Agus Rahardjo (juga) telah membenarkan salah satu pihak yang terjaring OTT, pagi tadi, adalah Romi.” (p7)</p>
<i>Ideologi</i>	<p>“Namun untuk detailnya, kata Agus, akan disampaikan dalam konferensi pers lanjutan di KPK.” (p9)</p>
<i>Rubrikasi</i>	<p>Menempatkan kasus OTT KPK Romi (dan beberapa pihak lain) dalam rubrik Hukum.</p>
<i>Klasifikasi</i>	<p>“Dalam operasi ini, penyidik menangkap sejumlah pihak, di antaranya petinggi PPP, M. Romahurmuziy alias Romi.” (p2)</p> <p>“..... Romi dicokok dari sebuah hotel di kawasan Jalan Basuki Rahmat Surabaya saat itu Romi tengah sarapan pagi.” (p3)</p> <p>“..... Sedangkan penangkapan pejabat Kemenang berlangsung dini hari tadi di kantor bersangkutan.” (p4)</p>

Sumber: <https://hukum.rmol.co/read/2019/03/15/382145/romahurmuziy-tengah-sarapan-saat-ditangkap>.

Elemen *kategorisasi*. Pada berita berjudul: “*Romahurmuziy Tengah Sarapan Saat Ditangkap*,” elemen kategorisasi terlihat pada paragraf 1, p5, dan p7. Ketiga kategorisasi dijadikan fungsi abstraksi dari pikiran atau konsep penulisan berita agar berita lebih sederhana, mudah dipahami, dan bermakna bagi khalayak pembaca. Fungsi abstraksi kategorisasi terlihat dari rangkaian kalimat: ‘*Romi yang saat ditangkap tengah sarapan di salah satu hotel di Surabaya*’. Kategorisasi berita ingin menunjukkan bahwa penangkapan Romi dalam operasi OTT KPK ‘benar terjadi’ (nyata/faktual). Fungsi abstraksi dari kategorisasi berita itu bersumber dari kutipan resmi Kabid Humas Polda Jatim dan pimpinan KPK. Tujuan dari fungsi abstraksi kategorisasi ini ingin memperjelas posisi OTT KPK kepada publik pembaca, bahwa OTT Romi bukan ‘kabar angin’ (*hoax*)—seperti banyak diberitakan di media sosial (*twitter*, facebook, instagram, dll)—yang sempat menyulut

kontroversi publik dijagad pemberitaan dunia maya tentang benar tidaknya Romi (sosok politisi yang dekat dengan presiden Joko Widodo) telah menjadi target dari OTT KPK.

Elemen *ideologi* terdapat dalam paragraf 10 (“*Namun untuk detailnya, kata Agus, akan disampaikan dalam konferensi pers lanjutan di KPK*”). Pernyataan Komisioner KPK ini secara simbolik merepresentasikan kepentingan dari gagasan tertentu agar dimaknai oleh publik pembaca (khalayak) sebagai: (1) sikap independen institusi KPK dalam konteks penegakan hukum; dan (2) KPK adalah institusi penegakan hukum yang adil, objektif, dan tidak ‘tebang pilih’. Pesan (gagasan tertentu) yang ingin disampaikan KPK kepada publik adalah bahwa penegakan hukum harus menjadi ‘wacana tandingan’ (*counter discourse*) sebagai landasan perlawanan dari praktik korupsi elite politik yang selama ini menjadi ‘wacana dominan’ (*counter discourse*). Kendati secara personal dan posisional Romi adalah Ketua Umum PPP, anggota DPR-RI, pimpinan di kubu TKN Jokowi-Ma’ruf, dan orang dekat Presiden Jokowi, namun dimata hukum, Romi tetaplah warga negara yang memiliki kedudukan yang sama dimuka hukum (*due process law; equality before the law*). Sejumlah posisi dan jabatan politik yang melekat pada diri Romi tidak lantas membuat dirinya menjadi kebal hukum.

Elemen *rubrikasi* terkait kasus penangkapan Romi (dan beberapa pihak lain dalam OTT KPK) ditempatkan RMOL.co dalam rubrik Hukum. Penempatan peristiwa OTT Romi pada rubrik Hukum tidak semata-mata dilatari oleh pertimbangan teknis redaksi RMOL.co, akan tetapi satu pilihan alur narasi (framing) yang akan dikonstruksi redaksi. Tujuan lain adalah untuk menggiring opini dan persepsi pembaca agar secara definisional mereka dapat memaknai peristiwa OTT Romi sebagai (murni) kasus hukum (tidak terkait dengan kepentingan politis). Penempatan teks berita dalam rubrik Hukum juga dilatari oleh pertimbangan (framing) agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kontroversi pada pembaca dalam memahami, dan memaknai isi berita yang disajikan; dan yang lebih penting tidak bisa dilepaskan dari teknik pembingkai, karena rubrikasi punya implikasi konseptual dalam membentuk peta kognisi dan persetujuan khalayak terhadap informasi, berita atau isu yang dibacanya.

Elemen *klasifikasi* terdapat dalam paragraf 2 (“*Dalam operasi ini, penyidik menangkap sejumlah pihak, di antaranya petinggi PPP, M. Romahurmuziy alias Romi*”), paragraf 3 (“*Romi dicokok dari sebuah hotel di kawasan Jalan Basuki Rahmat Surabaya saat itu Romi tengah sarapan pagi*”), dan paragraf 4 (“*sedangkan penangkapan pejabat Kemenang berlangsung dini hari tadi di kantor bersangkutan*”). Klasifikasi OTT Romi menunjukkan ada unsur resistensi dalam teks berita RMOL.co terkait perilaku koruptif dan kolusif Romi.

Secara bahasa, penggunaan diksi ‘petinggi PPP’ juga tidak bisa dilepaskan dari klasifikasi RMOL.co untuk mengategorikan perbuatan Romi sebagai bentuk nyata korupsi politik. Penggunaan kata ‘dicokok’ (padanan dari kata ‘ditangkap’) juga merupakan teknik klasifikasi (bagaimana suatu peristiwa dipahami, dikomunikasikan, dan ditonjolkan pada pembaca). Tujuan pemberitaan, di satu sisi memberi dukungan dan apresiasi terhadap kinerja KPK (*regain public trust*), dan pada sisi lain membentuk sikap oposisi/perlawanan publik (*public resitence*) terkait perilaku koruptif Romi selaku pimpinan parpol. Sebab, ada tidaknya dukungan atau oposisi publik atas OTT Romi sangat ditentukan oleh cara RMOL.co dalam pelihan bahasa (diksi), sturktur kalimat, dan penyajikan fakta-fakta berita kepada khalayak/publik pembaca.

Tabel 3.

Framing Berita 2: “BPN Prabowo-Sandi Prihatin Penangkapan Romahurmuziy”

<i>Kategorisasi</i>	“Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno prihatin dengan penangkapan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Muktamar Pondok Gede, M. Romahurmuziy.” (p1) "Walau kami berbeda pilihan, Gus Romi di kubu 01 (Jokowi-Maruf) dan kami 02 (Prabowo-Sandi), tentu kami tetap prihatin." (p4)
<i>Ideologi</i>	"Kami prihatin atas yang melanda Gus Romi, dia masih berusia muda, masa politiknya masih panjang. Kami terus terang prihatin," kata Jurubicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade kepada redaksi, Jumat (15/3)." (p2)
<i>Rubrikasi</i>	Menempatkan kasus OTT KPK Romi dalam rubrik Hukum.
<i>Klasifikasi</i>	“Dikabarkan, Romi terjaring OTT KPK dengan pejabat Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Jatim di wilayah hukum Jatim pada Jumat pagi.” (p5)

Sumber: <https://hukum.rmol.co/read/2019/03/15/382152/bpn-prabowo-sandi-prihatin-penangkapan-romahurmuziy>.

Elemen *kategorisasi*. Pada berita berjudul “BPN Prabowo-Sandi Prihatin Penangkapan Romahurmuziy,” elemen kategorisasi terlihat pada paragraf 1 dan p4. Kedua narasi kategorisasi berita menjadi fungsi abstraksi dari pikiran atau konsep berita RMOL.co, yakni menonjolkan sikap ‘prihatin’ atas penangkapan Romi dalam OTT KPK. Tujuannya, agar

narasi atas pesan dan makna berita yang ingin disampaikan lebih mudah dipahami pembaca. Dari sisi bahasa, kategorisasi ini setidaknya memiliki dua makna. Pertama, menunjukkan sikap ‘empati’ pihak BPN Prabowo-Sandi atas penangkapan Romi oleh KPK (kendati dalam sikap dan pilihan politik, Romi berada di kubu TKN yang secara politis behadap-hadapan dengan kubu BPN). Kedua, makna ‘kedewasaan politik’ yang dipetik pihak BPN dalam menyikapi OTT KPK atas Romi (dengan target menuai simpati publik), dengan memosisikan kasus Romi sebagai kasus hukum, membatasi lingkup masalah Romi pada ranah penegakan hukum, yang solusinya juga harus diselesaikan melalui prosedur/jalur hukum.

Elemen *ideologi* berita terdapat dalam paragraf 2 berita: “*Kami prihatin atas yang melanda Gus Romi, dia masih berusia muda, masa politiknya masih panjang. Kami terus terang prihatin.*” Kalimat yang bersumber dari pernyataan jubah BPN, Andre Rosiade, secara simbolik merepresentasikan kepentingan gagasan tertentu agar dimaknai oleh publik (khalayak pembaca) sebagai: (a) sikap netral BPN dalam menyikapi kasus OTT Romi (dibuktikan dengan tidak menyerang dan menyudutkan kasus Romi); (b) kedewasaan politik BPN Prabowo-Sandi yang mampu memisahkan secara jelas dan tegas antara ‘kasus hukum personal Romi’ dengan ‘posisi politik Romi’ sebagai ‘lawan tanding politik’ kubu BPN Prabowo-Sandi; (c) kubu BPN Prabowo-Sandi menunjukkan ‘empati’ dan ‘simpati’ terkait kasus yang membelit Romi (“*masih berusia muda, masa depan politiknya masih panjang*”); dan (d) membangun ‘wacana tandingan’ (*counter discourse*) sebagai bentuk perlawanan (antitesa) dari gaya ‘politik menyerang’ (sebagai wacana dominan) yang selama ini dipertontonkan oleh kubu TKN Jokowi-Ma’ruf. Elemen ideologis pemberitaan ini penting untuk ‘ditekankan’ guna merebut simpati, apresiasi, dan dukungan luas publik atas sikap politik BPN yang cerdas, matang, dan elegan dalam menyikapi kasus OTT Romi—yang sesungguhnya secara politis bisa dijadikan ‘senjata mematikan’ oleh kubu BPN untuk melakukan ‘serangan balik,’ *dus* ‘pembunuhan karakter’ (*character assassination*) atas citra diri Romi dan kubu TKN Jokowi-Ma’ruf sekaligus.

Elemen *rubrikasi* terkait kasus penangkapan Romi ditempatkan oleh RMOL.co dalam rubrik Hukum. Penempatan sikap simpati dan empati BPN (sebagai representasi kubu Prabowo-Sandi) terkait OTT Romi pada rubrik Hukum tidak semata-mata dilatari oleh pertimbangan teknis redaksi, akan tetapi wujud pilihan alur cerita (*framing*) yang akan disajikan redaksi untuk menggiring pembaca dalam memaknai sikap ‘keprihatinan’ kubu BPN atas OTT KPK Romi. Makna penonjolan adalah terbangunnya ‘simpati’ dan sikap ‘empati’: bahwa kasus OTT yang menimpa Romi adalah ‘murni kasus hukum’ yang tidak terkait dengan posisi politik Romi sebagai lawan dari kubu BPN (Prabowo-Sandi).

Penempatan teks berita pada rubrik Hukum juga dilatari oleh framing redaksi untuk menggiring opini pembaca dalam memaknai isi berita sebagai isu penegakan hukum dan pemberantasan tidak pidana korupsi. *Positioning* berita pada rubrik Hukum juga tidak bisa dilepaskan kepentingan RMOL.co dalam meraih dukungan publik melalui penekanan *statement* kubu BPN (Prabowo-Sandi) yang ‘sejuk’ dan ‘humanis’ sebagai narasi informasi yang berkarakter ‘wacana bertahan’ *versus* karakter ‘menyerang’ kubu TKN.

Elemen *klasifikasi* terdapat dalam paragraf 5 (“*Dikabarkan, Romi terjaring OTT KPK dengan pejabat Kantor Wilayah Kementerian Agama [Kanwil Kemenag] Jatim di wilayah hukum Jatim pada Jumat pagi*”). Klasifikasi pemberitaan Romi ini menunjukkan ada unsur ‘kabar penangkapan Romi’ oleh KPK sebagai framing berita. Ditinjau dari makna bahasa, penggunaan diksi ‘dikabarkan Romi terjaring OTT KPK’ terkait teknik klasifikasi RMOL.co untuk ‘sesegara mungkin’ menginformasikan kepada publik atas isu OTT Romi sebagai ‘wacana aktual publik.’ Penggunaan diksi ‘Romi tertangkap bersama pejabat Kantor Kemenag Jatim’ juga bentuk teknik klasifikasi, yakni bagaimana konstruksi narasi peristiwa penangkapan Romi dan pejabat Kemenag Jatim ditonjolkan sebagai inti berita pada publik (yang secara normatif mengaburkan hak hukum Romi yang belum tentu bersalah—*asas prejudice of innocence*). Tujuan klasifikasi berita: ‘memastikan’ kepada publik bahwa Romi adalah pelaku tindak pidana korupsi (yang dibuktikan dengan OTT KPK atas dirinya); menghadirkan citra negatif atas isu penangkapan itu, yakni munculnya reaksi dan sikap oposisi publik atas Romi (beserta seluruh atribut/identitas yang melekat dalam diri Romi) sebagai bentuk penggiringan opini.

Tabel 4.

Framing Berita 3: “Penangkapan Romi Bukti Kegagalan Jokowi”

<i>Kategorisasi</i>	<p>“Penangkapan Romahurmuziy oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pukulan telak bagi pemerintahan Joko Widodo.” (p1)</p> <p>"Sekarang masyarakat sudah tahu kalau Pemerintahan Joko Widodo ternyata gagal dalam menciptakan pemerintahan yang bersih." (p2)</p> <p>“Romi ditangkap KPK lantaran diduga kedapatan melakukan perbuatan pidana korupsi terkait jual beli jabatan di Kementerian Agama. Politisi PPP yang masuk jajaran ring-1 Jokowi itu ditangkap di sebuah hotel di Surabaya. (p3)</p>
<i>Ideologi</i>	<p>“Penangkapan Romi menunjukkan kegagalan Jokowi dalam mewujudkan pemerintahan kredibel dan berkualitas. Ulah Romi membuktikan seseorang menjadi pejabat negara adalah hasil jual beli jabatan.” (p4)</p>
<i>Rubrikasi</i>	<p>Menempatkan kasus OTT KPK Romi dalam rubrik Hukum..</p>
<i>Klasifikasi</i>	<p>“Jual beli jabatan merupakan sumber awal dari korupsi. Karena untuk mengembalikan uang untuk beli jabatan maka pejabat itu pasti melakukan korupsi.” (p5)</p> <p>"Jangan-jangan di semua departemen selama era Joko Widodo berkuasa, pejabat-pejabat yang punya posisi tinggi tidak didasari <i>fit and proper test</i> yang transparan, (tetapi) dari hasil jual beli jabatan." (p6)</p> <p>“.... memastikan praktik jual beli jabatan akan dihabisi sampai ke akar-akarnya jika Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menerima amanah sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.” (p7)</p>

Sumber: <https://hukum.rmol.co/read/2019/03/16/382257/penangkapan-romi-bukti-kegagalan-jokowi>.

Elemen *kategorisasi*. Pada berita berjudul: “*Penangkapan Romi Bukti Kegagalan Jokowi*,” elemen kategorisasi terlihat pada paragraf 1, p2, dan p3—seperti terlihat pada tabel 4 di atas. Ketiga paragraf dijadikan fungsi abstraksi dari pikiran atau konsep penulisan berita redaksi RMOL.co, yakni menonjolkan kalimat ‘pukulan telak’ pemerintahan Jokowi atas penangkapan Romi. Tujuan penggunaan diksi ‘pukulan telak’ agar narasi dan pesan yang disampaikan RMOL.co lebih mudah dipahami pembaca. Dari sisi bahasa, kategorisasi berita

ini setidaknya memiliki dua makna. *Pertama*, menonjolkan kasus OTT Romi sebagai wacana utama berita (yang secara moral-politik tentu akan mencoreng wajah pemerintahan Jokowi). *Kedua*, makna ‘delegitimasi’ pemerintahan Jokowi dengan mendefinisikan atau memosisikan kasus penangkapan Romi sebagai kegagalan pemberantasan korupsi para aktor politik di lingkaran rezim Jokowi, menempatkan penangkapan Romi sebagai invaliditas penegakan hukum yang menjadi janji kampanye Presiden Jokowi. Solusinya adalah dengan meminta pertanggungjawaban hukum pemerintahan Jokowi atas berbagai kasus korupsi yang terus membelit para aktor/elite politik di lingkaran terdekatnya, guna mengembalikan kepercayaan publik kepada pemerintahan Jokowi.

Elemen *ideologi* terekam dalam paragraf 4 berita: “*Penangkapan Romi menunjukkan kegagalan Jokowi dalam mewujudkan pemerintahan kredibel dan berkualitas. Ulah Romi membuktikan seseorang menjadi pejabat negara adalah hasil jual beli jabatan.*” Kalimat yang bersumber dari *statement* Arif Poyuono (Wakil Ketua Umum DPP Gerindra) tersebut secara simbolik merepresentasikan kepentingan gagasan tertentu yang dapat dimaknai publik sebagai: (a) rezim Jokowi telah gagal dalam mewujudkan pemerintahan yang kredibel dan berkualitas; (b) insituisi dalam pemerintahan Jokowi dipenuhi oleh para pejabat yang meraih jabatannya bukan karena faktor integritas, dedikasi, dan prestasi tetapi karena praktik jual beli jabatan. Kedua elemen ideologis berita ini penting untuk ‘ditekankan’ sebagai bentuk ‘delegitimasi’ atas kinerja buruk rezim Jokowi—terutama kinerja pemerintah Jokowi di sektor penegakan hukum dan penciptaan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari praktik KKN. Target framing berita sangat mungkin diarahkan mengonstruksi *public distrust* sebagai wacana tandingan yang potensial berujung pada pengembosan kepercayaan rakyat terhadap rezim Jokowi dalam menghadapi kompetisi pilpres 2019 lalu.

Elemen *rubrikasi* terkait penangkapan Romi sebagai bukti kegagalan Jokowi ditempatkan dalam rubrik Hukum. Pilihan kata (diksi) ‘kegagalan pemerintah Jokowi’ bukan semata pertimbangan teknis pemberitaan, namun bentuk pilihan alur cerita yang akan disajikan RMOL.co untuk menggiring opini pembaca dalam menafsirkan penangkapan Romi sebagai bukti ketidakmampuan rezim Jokowi dalam menegakkan hukum, membangun aparatur pemerintahan yang bersih, dus menggiring opini pembaca bahwa rezim Jokowi dipenuhi oleh elite politik yang berwatak koruptif dan kolusif. *Positioning* berita pada rubrik Hukum juga sangat mungkin ditujukan untuk meraih dukungan publik melalui pengutipan secara luas *statement* Arif Poyuono sebagai satu-satunya narasumber dalam penyusunan fakta berita.

Elemen *klasifikasi* terdapat dalam paragraf 5 (“*Jual beli jabatan merupakan sumber awal dari korupsi. Karena untuk mengembalikan uang untuk beli jabatan maka pejabat itu pasti melakukan korupsi*”), paragraf 6 (“*Jangan-jangan di semua departemen selama era Joko Widodo berkuasa, pejabat-pejabat yang punya posisi tinggi tidak didasari fit and proper test yang transparan, [tetapi] dari hasil jual beli jabatan*”), dan paragraf 7 (“*.... memastikan praktik jual beli jabatan akan dihabisi sampai ke akar-akarnya jika Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menerima amanah sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024*”). Penonjolan diksi ‘jual beli jabatan sebagai sumber awal korupsi’, ‘jabatan di semua departemen era Jokowi diperoleh tanpa mekanisme *fit and proper*’, ‘memastikan praktik jual beli jabatan akan dihabisi sampai ke akar-akarnya jika Prabowo-Sandi menerima amanah sebagai presiden dan wakil presiden’ digunakan RMOL.co sebagai wacana inti (*framing*) dalam klasifikasi isi berita. Tujuan klasifikasi berita: (a) menggiring opini dan persepsi publik bahwa OTT Romi telah melahirkan citra negatif publik terkait kegagalan pemerintahan Jokowi (gagal dalam menegakkan hukum, buntu dalam memberantas korupsi, dan gagap dalam membangun *good and clean government*); (b) mendorong hadirnya reaksi negatif dan sikap oposisi publik atas rezim Jokowi; sekaligus *men-support* kelompok oposisi (yang direpresentasikan oleh figur Prabowo-Sandi) sebagai *role model* kepemimpinan Indonesia masa depan yang ‘lebih menjanjikan.’

Tabel 5.

Framing Berita 4: “OTT Romi Bukti Politisi Semakin Sakit”

<i>Kategorisasi</i>	<p>“Penangkapan M. Romahurmuziy oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai keprihatinan.” (p1)</p> <p>“OTT ketua umum parpol lagi-lagi nunjukkan politisi semakin sakit” (p3)</p>
<i>Ideologi</i>	<p>“Dalam hukum pidana hal ini disebut dengan <i>dolus</i> (kesengajaan). Maksudnya, yang bersangkutan dan pihak-pihak yang ikut terlibat sangat tahu resiko dari apa yang dikerjakan.” (p9)</p> <p>"Jadi antara yang memilih fungsi jadi makelar, pembeli dan penjual jabatan ini ada keinginan yang sama, tujuan yang sama. Ini tidak bisa main sendiri, sehingga disepakati nilai besaran nominal tersebut untuk mengisi jabatan di level Kementerian Agama dan kapan diadakan serah terima uang tersebut." (p10)</p>

	"Hukum itu mengenal asas <i>accesorium non ducit, sed sequitur, suum principale</i> (pelaku pembantu tidaklah memimpin, melainkan mengikuti pelaku utamanya) akan diketahui siapa pelaku utamanya segera dalam OTT ini." (p12)
Rubrikasi	Menempatkan kasus OTT KPK Romi dalam rubrik Hukum.
Klasifikasi	“ level Kemenag saja melazimkan hal curang begitu apalagi dipelopori langsung oleh ketua umum parpol yang basisnya atas nama agama.” (p13) “Miris ... habislah anak anak muda potensial penerus bangsa gara-gara perilaku korupsi, ini pasti ada yang salah harus segera berbenah.” (p14)

Sumber: <https://politik.rmol.co/read/2019/03/17/382375/ott-rommy-bukti-politisi-semakin-sakit>.

Elemen *kategorisasi*. Pada berita berjudul: “*OTT Romi Bukti Politisi Semakin Sakit*,” elemen kategorisasi terlihat pada paragraf 1 dan p2. Kategorisasi dijadikan fungsi abstraksi dari pikiran atau konsep penulisan berita redaksi RMOL.co, yakni menonjolkan kalimat ‘penangkapan Romi menuai keprihatinan’ dan kalimat ‘politisi semakin sakit’. Tujuan penggunaan diksi ‘menuai keprihatinan’ dan ‘politisi semakin sakit’ agar narasi (inti pesan) yang disampaikan lebih menyentuh aspek kognisi dan psikis pembaca. Dari sisi bahasa, kategorisasi berita seperti ini setidaknya dapat dibaca dalam dua makna berikut: (a) kasus OTT Romi (yang secara moral-politik mencoreng wajah Presiden Jokowi) adalah bentuk keprihatinan publik atas fenomena korupsi politik yang terus menggerogoti legitimasi kekuasaan pemerintah; dan (b) makna ‘semakin sakit’ (bisa dimaknai ‘korupsi berlangsung kian parah dan keterlaluhan’) menunjukkan konsep definisional sekaligus memosisikan tingkat keparahan (*destruksi*) wabah korupsi yang intensitasnya kian meluas dilingkar elite rezim Jokowi.

Elemen *ideologi* berita terdapat dalam paragraf 9: “*Dalam hukum pidana hal ini disebut dengan dolus (kesengajaan). Maksudnya, yang bersangkutan dan pihak-pihak yang ikut terlibat sangat tahu resiko dari apa yang dikerjakan*”, p10: “*Jadi antara yang memilih fungsi jadi makelar, pembeli dan penjual jabatan ini ada keinginan yang sama, tujuan yang sama. Ini tidak bisa main sendiri, sehingga disepakati nilai besaran nominal tersebut untuk mengisi jabatan di level Kementerian Agama dan kapan diadakan serah terima uang tersebut*”, dan p11: “*Hukum itu mengenal asas *accesorium non ducit, sed sequitur, suum principale* (pelaku pembantu tidaklah memimpin, melainkan mengikuti pelaku utamanya) akan diketahui siapa pelaku utamanya segera dalam OTT ini.*” Elemen ideologis berita yang bersumber dari

statement Azmi Syahputra (Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia/Alpha) sangat penting untuk ditekankan karena secara simbolik merepresentasikan konsep ideologis, yakni: (a) makelarisasi jabatan telah berlangsung massif di Kemenag; (b) jual beli jabatan telah berlangsung lama, terstruktur, dan sistematis (menihilkan prinsip *merit system* yang *committed* atas nilai-nilai profesionalitas, integritas, dedikasi, dan prestasi sebagai tolok ukur promosi); (c) praktik jual beli jabatan telah berdampak pada *existing* korupsi tersembunyi di Kemenag yang narasinya terbongkar luas pasca OTT Romi. Elemen ideologis berita ini penting untuk ‘ditonjolkan’ sebagai teknik ‘delegitimasi’ politis, yakni untuk menunjukkan kegagalan rezim Jokowi dalam membangun birokrasi yang bersih, transparan, bebas dari pungli dan praktik politik uang (KKN).

Elemen *rubrikasi* terkait judul ‘OTT Romi sebagai bukti politisi semakin sakit’ ditempatkan dalam rubrik Hukum. Penempatan diksi ‘OTT Romi sebagai bukti politisi semakin sakit’ pada rubrik Hukum adalah wujud pilihan redaksi untuk membangun alur cerita guna menggiring opini pembaca dan persepsi publik dalam memaknai isi berita, sekaligus framing bahwa di lingkungan Kemenag dan pimpinan PPP banyak bermukim aktor pelaku jual beli jabatan. *Positioning* berita pada rubrik Hukum juga terkait dengan framing RMOL.co untuk membentuk opini sekaligus meraih dukungan publik melalui pengutipan tunggal pernyataan Azmi Syahputra (Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia/Alpha) sebagai satu-satunya narasumber dalam penyusunan fakta berita.

Elemen *klasifikasi* terdapat dalam paragraf 13 (“*Level Kemenag saja melazimkan hal curang begitu apalagi dipelopori langsung oleh ketua umum parpol yang basisnya atas nama agama*”) dan 14 (“*miris ... habislah anak anak muda potensial penerus bangsa gara-gara perilaku korupsi, ini pasti ada yang salah harus segera berbenah*”). Penonjolan diksi ‘Kemenag saja melazimkan kecurangan’, ‘habislah anak anak muda potensial penerus bangsa gara-gara perilaku korupsi’, dan kalimat ‘pasti ada yang salah harus segera berbenah’ sebagai bentuk penonjolan berita yang dikutip RMOL.co sebagai wacana inti (framing) berita. Tujuan klasifikasi isi berita: (a) menggiring opini publik bahwa Kemenag sebagai institusi yang membawahi masalah keagamaan (penjaga norma, etika, kaidah, dan akidah masyarakat/umat) justru melazimkan praktik kecurangan dalam bentuk jual beli jabatan diinstansinya; (b) menggiring persepsi publik bahwa PPP selaku partai berbasis Islam menjadi pelopor kecurangan (menginisiasi praktik jual beli jabatan) yang dimotori oleh Ketua Umum PPP itu sendiri; (c) perilaku tersebut akan menjadi contoh yang tidak baik bagi generasi muda; (d) perlu ada pembenahan mendasar ditubuh Kemenag dan parpol terkait isu ini. Berikutnya, kasus OTT Romi dimaknai oleh RMOL.co sebagai bukti ‘kian sakitnya politisi’ di negeri ini.

Tabel 6. Framing Berita 5: “Romi Pintu Masuk KPK ke Lingkungan Jokowi”

<i>Kategorisasi</i>	<p>“.... bagaimanapun juga negeri ini harus bersih dari praktik kotor korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk itu, komisi antirasuah tidak boleh pandang bulu.” (p2)</p> <p>“ sudah saatnya KPK melibas tanpa pandang bulu. Semoga KPK tidak sungkan terhadap Romi yang sangat dekat sama Jokowi” (p3)</p>
<i>Ideologi</i>	<p>“Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Anggota DPR RI dari Fraksi PPP M. Romahurmuziy harus dijadikan sebagai langkah awal bagi KPK untuk mengusut semua kasus dugaan korupsi yang melibatkan orang dekat Presiden Joko Widodo.” (p1)</p>
<i>Rubrikasi</i>	<p>Menempatkan kasus OTT KPK Romi dalam rubrik Hukum.</p>
<i>Klasifikasi</i>	<p>“Kabar tentang dugaan KKN yang dilakukan oleh orang-orang di lingkaran penguasa, termasuk Romi sangat kencang terdengar.” (p4)</p> <p>“ Romi sudah lama di TO (target operasi). Ini membuktikan lingkaran inti Jokowi tidak steril dari perilaku koruptif” (p5)</p>

Sumber: <https://hukum.rmol.co/read/2019/03/18/382488/romi-pintu-masuk-kpk-ke-lingkaran-jokowi>.

Elemen *kategorisasi*. Pada berita berjudul: “*Romi Pintu Masuk KPK ke Lingkungan Jokowi*,” elemen kategorisasi terlihat pada paragraf 2 dan p3. Kedua paragraf dijadikan fungsi abstraksi dari pikiran atau konsep penulisan berita, yakni menonjolkan kalimat ‘negeri ini harus bersih dari praktik rasuah’ dan ‘komisi rasuah tidak boleh pandang bulum dalam menindak pelaku korupsi’. Tujuan penggunaan diksi ‘bebas dari rasuah’ dan ‘menindak pelaku rasuah tanpa pandang bulu’ bertujuan memperjelas fungsi narasi (inti pesan) berita agar lebih menyentuh aspek psikis/emosi serta mudah dipahami khalayak pembaca. Dari sisi bahasa, kategorisasi berita seperti ini setidaknya dapat dibaca dalam dua makna: (1) kasus Romi bisa menjadi pintu masuk bagi pemberantasan korupsi dilingkaran Jokowi; (2) Presiden Jokowi dapat membuka peluang KPK untuk masuk ke istana, dan memeriksa orang-orang dilingkungan istana yang potensial juga berlaku korup seperti Romi.

Elemen *ideologi* berita terdapat dalam paragraf 1 berita: “*Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Anggota DPR RI dari Fraksi PPP M. Romahurmuziy harus dijadikan sebagai langkah awal bagi KPK untuk mengusut semua kasus dugaan korupsi yang*

melibatkan orang dekat Presiden Joko Widodo.” Elemen ideologis berita yang bersumber dari *statement* Andrianto (Presidium Persatuan Pergerakan) yang dijadikan tekanan utama karena *statement* ini secara simbolik merepresentasikan gagasan ideologis, yakni: (a) OTT Romi menjadi langkah awal pembersihan praktik makelarisasi dan jual beli jabatan; (b) berbagai praktik tersebut telah berdampak signifikan pada perusakan sistemik di tubuh pemerintah; (c) Praktik korupsi yang diinisiasi dari lingkaran elite dan lingkungan terdekat presiden akan merusak kepercayaan publik pada pemerintah dalam jangka panjang. Elemen ideologis berita ini penting untuk ditonjolkan guna meraih dukungan politis publik pada tindakan KPK.

Elemen *rubrikasi* terkait judul OTT Romi sebagai bukti politisi semakin sakit ditempatkan dalam rubrik Hukum. Penempatan pada rubrik Hukum adalah wujud pilihan RMOL.co untuk membangun alur cerita sebagai langkah penggiringan opini pembaca dan persepsi publik untuk memaknai isi berita, bahwa berbagai praktik kotor korupsi telah berlangsung dalam derajat yang parah, karena diinisiasi langsung oleh elite politik sebagai bentuk nyata dari korupsi politik. *Positioning* berita pada rubrik Hukum juga terkait dengan: (a) isu pemberantasan korupsi bukanlah isu politik, tetapi isu (penegakan) hukum; (b) framing RMOL.co sepertinya ditujukan untuk membentuk opini sekaligus meraih dukungan publik melalui pengutipan pernyataan Andrianto (Presidium Persatuan Pergerakan)—yang dikenal kritis terhadap pemerintah—sebagai narasumber tunggal dalam penyusunan fakta berita.

Elemen *klasifikasi* terdapat dalam paragraf 2 (“.... negeri ini harus bersih dari praktik kotor KKN ... komisi antirasuah tidak boleh pandang bulu.”) dan p3 (“.... sudah saatnya KPK melibas (dan) tidak sungkan terhadap Romi (dan orang-orang) yang sangat dekat sama Jokowi”). Penonjolan diksi ‘bagaimanapun juga negeri ini harus bersih dari praktik KKN’, dan ‘sudah saatnya KPK tidak sungkan melibas Romi’ digunakan sebagai wacana inti (framing) dalam klasifikasi isi berita. Tujuan klasifikasi berita: (a) menggiring opini (framing) bahwa Indonesia saat ini tengah mengalami fase praktik KKN yang amat parah; (b) mendorong KPK untuk bertindak tegas dan tanpa pandang bulu terhadap praktik rasuah, terutama para elite yang ada di lingkungan terdekat Jokowi. Tujuan klasifikasi berita adalah untuk mengonstruksi empati publik sekaligus sikap perlawanan publik (*public resitence*) atas praktik rasuah yang berlangsung kian parah, massif, dan sistemik di era pemerintahan Jokowi.

Diskusi

Sebagai teknik membingkai sebuah peristiwa, teknik framing terbukti digunakan RMOL.co dalam penyajian berita terkait kasus OTT Romi oleh KPK. Wartawan/redaksi RMOL.co memberi tekanan kepada khalayak pembacanya melalui praktik bahasa (konstruksi wacana berita) untuk melihat bagaimana *setting*, *lead*, alur cerita, dan narasi peristiwa Romi dimaknai dalam teks berita; termasuk mengarahkan sisi mana dari peristiwa Romi yang ditonjolkan dalam pemberitaan. Secara teoritis, framing berita memang membutuhkan strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam berita yang akan ditulis. Tujuannya, agar sebuah berita terkesan lebih bermakna, lebih menarik, dan lebih mudah dipahami dan diingat oleh para pembaca (Eriyanto, 2011).

Sebagai proses konstruksi berita (yang melibatkan bias/subjektivitas wartawan), framing akan selalu menghadirkan konstruksi berita dengan cara dan makna tertentu (Durham, 1988). Realitas ini tergambar secara jelas dalam pemberitaan RMOL.co terkait kasus OTT Romi. Alur cerita Romi versus KPK di framing secara berbeda oleh RMOL.co: KPK tak hanya ditonjolkan perannya, namun juga diberi makna positif (lebih diperhatikan; lebih penting). Sebaliknya, Romi disudutkan posisinya, diberi makna negatif, dan dituding sebagai aktor perusak yang berlindung di balik kekuasaan Jokowi.

Framing berita OTT Romi jelas terafirmasi untuk menggiring interpretasi khalayak pembaca RMOL.co dalam rangka pertarungan wacana (*counter discourse*). Melalui framing berita, khalayak diasumsikan akan lebih mudah diarahkan media dengan strategi mengonstruksi isi, alur, dan makna narasi berita agar mengerti dan memahami tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah berita (Sobur, 2015). Seperti dikatakan Adelman (1993), framing sesungguhnya membuat dunia—relasi dunia hukum dengan kekuasaan politik yang terkonstruksi dalam kasus OTT Romi—lebih mudah dipahami dan dimengerti publik melalui simplifikasi realitas sosial politik dengan melihat alur dan isi narasi berita yang bersumber dari elemen kategori berita, ideologi berita, rubrikasi, dan klasifikasi berita yang tersaji dalam sebuah teks berita.

Ditelisik dari sisi teori aktor, Romi adalah aktor politik yang secara aktif bersaing dalam memperebutkan makna (citra diri) dalam panggung politik dan demokrasi selebrasi yang menguat sebagai tren politik negeri ini. Sementara RMOL.co adalah salah satu portal berita yang berperan dalam menyebarkan frame atas peristiwa para aktor yang berada dalam panggung politik selebrasi, sehingga pemaknaan atas peristiwa OTT Romi oleh KPK tersebar luas dan hampir ditafsirkan secara tunggal oleh khalayak: Romi adalah pelaku/aktor. Framing pemberitaan kasus OTT Romi merupakan bentuk ‘pemingkaiian strategis’ (*strategic frame*) yang dihadirkan RMOL.co di ruang publik dari rangkaian aktivitas politik yang saling

mempengaruhi di antara isu OTT Romi, media (RMOL.co), dan khalayak (pembaca berita). Proses framing RMOL.co tentu tidak berjalan linear, karena saat RMOL.co mengonstruksi frame pemberitaan negatif atas perilaku Romi, maka selaku aktor politik, Romi juga sesungguhnya tengah memanfaatkan frame RMOL.co untuk mempengaruhi persepsi khalayak—atas kasus yang membelit dirinya—sebagai ‘korban’ (*victim*) dari sebuah skenario besar korupsi politik rezim Jokowi.

Kondisi ini relevan dengan pandangan Snow (2017) dan Zak (2017), dimana institusi publik seperti KPK yang tengah mengalami *public distrust* memerlukan strategi untuk memulihkan citra dirinya, yakni melalui *endorsement* pemberitaan media massa yang atraktif (pengungkapan kasus korupsi yang mejerat aktor/elite politik seperti OTT KPK atas Romi). Dari sisi *Neuroscience*, pemberitaan media—dalam konteks *regain of trust*—ditujukan untuk memproduksi sebanyak mungkin *oxytocin*—hormon yang diproduksi tubuh manusia di dalam otak—guna mempengaruhi pembalikan persepsi publik atas citra KPK. Semakin banyak produksi *oxytocin* yang dihasilkan oleh otak pengirim (framing berita RMOL.co atas isu korupsi aktor/elite politik), maka akan semakin cepat proses pemulihan persepsi publik atas KPK guna meraih kembali opini positif publik atas kinerja KPK. Dan untuk meraih kembali kepercayaan publik, media perlu mengonstruksi (melalui framing/konstruksi berita) hubungan saling percaya antara publik (khalayak) dan institusi (KPK).

Dengan mengedepankan wacana ideologi penegakan hukum (*law enforcement*), delegitimasi atas praktik korupsi, dan munculnya *public distrust* yang digunakan sebagai gagasan tertentu (*counter discourse*), maka wacana OTT Romi terkait praktik jual beli/makelarisasi jabatan digunakan sebagai konstruksi wacana, yakni bentuk perlawanan ideologis (*counter ideology*) terhadap berbagai modus dan praktik korupsi politik yang diinisiasi para elite politik yang kian hari kian liar, brutal, terstruktur, sistematis, dan massif (korupsi sebagai produk kekuasaan politik—*dominant discourse*). Praktik korupsi dan perilaku koruptif yang diinisiasi para elite politik (yang terstruktur, massif, dan sistemik) terjadi karena kekuasaan politik negara kian berwatak arogan dan monopolistik, dimana produk diskresi negara begitu besar; sementara sistem pengawasan dan akuntabilitas berada sepenuhnya dalam kendali elite, sehingga korupsi = [*monopoly + discretion*] – *accountability* (Klitgaard, 1998).

Disamping penguatan instrumen penegakan hukum, pembertasan korupsi juga membutuhkan peran media (pertarungan ide, kontrol wacana) guna memperkuat posisi publik dan barisan gerakan anti korupsi, sehingga pencegahan praktik korupsi politik dapat

dilakukan secara lebih efektif dan melibatkan partisipasi luas publik (sebagai wacana tandingan, *counter discourse*) (Salam, 2004).

Penutup

Dari Pembahasan dan analisis terkait konstruksi pemberitaan OTT Romahurmuziy oleh KPK (ditinjau dari keempat elemen analisis Murray Edelman) dapat disimpulkan beberapa hal berikut.

Teks berita 1. Elemen *kategorisasi*: penangkapan Romi ‘benar terjadi’ bukan ‘kabar angin’ (*hoax*). Elemen *ideologi*: wacana penegakan hukum sebagai wacana tandingan (*counter discourse*) atas praktik korupsi politik sebagai wacana dominan (*dominant discourse*). Elemen *rubrikasi*: memaknai kasus OTT Romi sebagai (murni) kasus hukum (bukan kasus politis). Elemen *klasifikasi*: ada unsur resistensi terkait perilaku koruptif, kolusif, dan nepotik Romi dan penggunaan kata ‘dicokok’ (atau ‘ditangkap’) sebagai bentuk penekanan/penonjolan berita kepada publik pembaca.

Teks berita 2. Elemen *kategorisasi*: penonjolan sikap ‘prihatin’ (empati dan simpati) kubu BPN atas penangkapan Romi menunjukkan ‘kedewasaan politik’ BPN serta membatasi isu OTT Romi pada ranah penegakan hukum—sebagai *counter discourse* atas sikap politik TKN yang kerap bersikap ofensif terhadap BPN. Elemen *ideologi*: kedewasaan politik BPN dalam menyikapi kasus OTT Romi guna meraih simpati sosial dan dukungan politik publik. Elemen *rubrikasi*: menyikapi kasus Romi sebagai masalah hukum, bukan problem politis yang membutuhkan penanganan secara sistemik. Elemen *klasifikasi*: Romi sebagai koruptor, terbangunnya citra negatif atas isu penangkapan Romi, munculnya reaksi dan sikap oposisi publik kepada pemerintahan Jokowi terkait kasus OTT Romi.

Teks berita 3. Elemen *kategorisasi*: delegitimasi rezim melalui penekanan diksi kegagalan rezim Jokowi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Elemen *ideologi*: makelarisasi jabatan; praktik jual beli jabatan telah menihilkan prinsip *merit system*; praktik jual beli jabatan berdampak pada *existing* korupsi tersembunyi di Kemenag yang kian mempersulit terbangunnya birokrasi yang bersih dan bebas KKN. Elemen *rubrikasi*: OTT Romi yang ditempatkan dalam rubrik Hukum (sebagai bukti kegagalan penegakan hukum rezim Jokowi). Elemen *klasifikasi*: jual beli jabatan sebagai sumber korupsi; di era Jokowi jabatan diperoleh tanpa mekanisme *fit and proper test*; praktik jual beli jabatan akan dihabisi sampai ke akar-akarnya jika Prabowo-Sandi terpilih sebagai presiden/wakil presiden.

Teks berita 4. Elemen *kategorisasi*: kasus OTT Romi telah mencoreng wajah Presiden Jokowi; keprihatinan publik atas praktik korupsi di Kemenag yang diinisiasi petinggi parpol berbasis Islam; elite politik di lingkaran Jokowi semakin sakit. Elemen *ideologi*: makelarisasi

jabatan di Kemenag; jual beli jabatan yang berlangsung terstruktur dan sistematis telah menihilkan prinsip *merit system*; *existing* dan modus tersembunyi korupsi di Kemenag terbongkar pasca OTT Romi. Elemen *rubrikasi*: *positioning* berita pada rubrik Hukum. Elemen *klasifikasi*: Kemenag melazimkan praktik praktik jual beli jabatan; PPP sebagai parpol pelopor kecurangan; perilaku Kemenag dan PPP menjadi contoh buruk generasi muda; pentingnya melakukan reformasi total ditubuh Kemenag dan parpol.

Teks berita 5. Elemen *kategorisasi*: kasus Romi menjadi pintu masuk bagi pemberantasan korupsi dilingkaran Jokowi. Elemen *ideologi*: OTT Romi menjadi langkah awal dari pembersihan praktik korupsi, makelarisasi, dan jual beli jabatan; praktik korupsi telah merusak citra pemerintah; *existing* korupsi di lingkaran elite politik terdekat presiden akan merusak *public trust* dalam jangka panjang. Elemen *rubrikasi*: *Positioning* berita pada rubrik Hukum terkait dengan isu penegakan hukum. Elemen *klasifikasi*: framing Indonesia tengah mengalami fase praktik KKN yang parah; mendorong KPK bertindak tegas dan tanpa pandang bulu untuk terus melawan praktik korupsi.

Pemberitaan RMOL.co menunjukkan keberpihakan pada pengungkapan kasus OTT Romi oleh KPK. Aspek subjektivitas atas OTT Romi terlihat dari framing berita RMOL.co yang lebih banyak menyoroti sisi negatif perilaku politik Romi (seolah Romi adalah pelaku tunggal; tidak melihat Romi sebagai korban dari sistem kekuasaan korup), serta sisi positif KPK (dan kubu BPN) pada sisi lain.

Penelitian ini merekomendasikan kepada khalayak pembaca untuk bersikap lebih kritis dalam menyimpulkan isi pemberitaan media. Sementara untuk wartawan, pengelola, dan praktisi media, penelitian ini merekomendasikan para praktisi dan pengelola media dapat menyampaikan peristiwa objektif, tidak mem-framing berita secara berlebihan (bias, subjektif), memiliki tanggung jawab sosial pada publik pembaca, serta dapat menyajikan pemberitaan yang lebih presisif sesuai dengan etika dan prinsip kerja jurnalistik yang adil, berimbang (*cover both side*), dan tidak memihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Affianto, Donix Kurniawan (2017). Pembungkahan Berita Kasus Suap Patrialis Akbar di Harian Kompas: Analisis Framing Robert N. Entman Harian Kompas Edisi Januari-Februari 2017 (*Unpublished Undergraduate Thesis*). Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Alkotsar, Artidjo (2009). Korelasi Korupsi Politik dengan Hukum dan Pemerintahan di Negara Modern (Telaah Tentang Praktik Korupsi Politik dan Penanggulangannya).

- Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Edisi Khusus (16), 155-179. Retrieved from <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/3871/3446>.
- Bond, Frank Fraser (1961). *An Introduction to Journalism: A Survey of the Fourth Estate in All Its Forms*. Macmillan: Universitas Michigan.
- Burton, G. (2005). *Media and Society: Critical Perspectives*. New Delhi: Rawat Publication.
- Creswell, John W. (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan*. Edisi 3 (Terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- DiMaggio, Paul and Powell, Walter (1988). "Interest and Agency in Institutional Theory," in J. Meyer and R. Scott (eds.). *Organizational Environments*. Beverly Hills: SagePublications.
- Edelman, Murray (1993). Contestable Categories and Public Opinion. *Journal Political Communication*, 3 (10), 231-242. Retrieved from <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10584609.1993.9962981>.
- E., Hadiati, Abdullah, Irwan dan Udasmoro, Wening (2013). Konstruksi Media Terhadap Pemberitaan Kasus Perempuan Koruptor. *Jurnal Al-Ulum*, 2 (13), 345-372. Retrieved from DOI: 10.22146/jps.v2i2.30001.
- Eriyanto (2011). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Fahmi (2016). Analisis Framing Pemberitaan Media *Online Rakyat Merdeka* dan *CNN Indonesia* dalam Isu Penetapan 19 Pondok Pesantren Penyebar Paham Radikalisme Oleh BNPT (*Unpublished Postgraduate Thesis*). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1-86. Retrieved from <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/33632>.
- Hamad, Ibnu. Lebih Dekat dengan Analisis Wacana (2007). *Jurnal Mediator*, 8 (2), 325-344. Retrieved from <https://doi.org/10.29313/mediator.v8i2.1252>.
- Hamzah, Andi (2005). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hardi (2016). 8 Jenis Sosial Media dan Perkembangannya. Retrieved March 22, 2019, from <https://www.progresstech.co.id/blog/jenis-sosial-media/>
- Hidayat, Dedy N. (2002). Metodologi Penelitian dalam Sebuah 'Multi-Paradigm Science'. *Jurnal Mediator*, 3 (2), 197-219. Retrieved from <https://doi.org/10.29313/mediator.v3i2.766>.
- Hidayat, Dedy N. (2003). *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*. Jakarta: Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia.

Hidayatullah, Raden Aryadi (2016). LKP: Pembuatan Desain Website Sebagai Penunjang Company Profile CV. Hensindo (*Unpublished Thesis*). Retrieved from <http://repository.dinamika.ac.id/id/eprint/2329/>

<https://antikorupsi.org/id/news/215-kepala-daerah-jadi-tersangka-korupsi>.

https://antikorupsi.org/sites/default/files/outlook_korupsi_politik_2018_110118.pdf

<https://hukum.rmol.co/read/2019/03/15/382152/bpn-prabowo-sandi-prihatin-penangkapan-romahurmuziy>.

<https://hukum.rmol.co/read/2019/03/18/382488/romi-pintu-masuk-kpk-ke-lingkaran-jokowi>.

<https://hukum.rmol.co/read/2019/03/16/382257/penangkapan-romi-bukti-kegagalan-jokowi>.

<https://hukum.rmol.co/read/2019/03/15/382145/romahurmuziy-tengah-sarapan-saat-ditangkap>.

<https://kabar24.bisnis.com/read/20190316/16/900414/kisah-lengkap-mahfud-md-ingatkan-rommy-sudah-lama-diincar-kpk>.

<https://nasional.kompas.com/read/2019/11/15/03000061/angka-kepercayaan-publik-yang-menurun-jadi-pelecut-bagi-kpk>

<https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2019/03/15/ketua-parpol-yang-ditangkap-kpk-ternyata-ketum-ppp-romahurmuziy/>

<https://politik.rmol.co/read/2019/03/17/382375/ott-rommy-bukti-politisi-semakin-sakit>.

<https://rmol.co/mediakit/example-assets/books/mediakit.pdf?0.19426893815398216>.

<https://teguhtimur.com/about/>

<https://tirto.id/kronologi-lengkap-ott-ketua-ppp-romahurmuziy-oleh-kpk-djDX>.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/kpk-soal-ott-romi-diduga-bukan-transaksi-pertama-kali>.

Ikbar, Yanuar (2012). *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Membuat Tugas Akhir/Karya Ilmiah*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Jamil, Achmad (2014). Gerakan Sosial dalam Perspektif Framing: Studi Pembentukan Proses dan Pertarungan Framing Pada Gerakan Sosial Sengketa Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri Tahun 2009 dan 2012 (*Unpublished Dissertation*), 1-10. [Online] Retrieved from: <http://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-20364586.pdf>. [Accessed: 15 November 2019].

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005). Edisi Ketiga. Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas dan Balai Pustaka.

Klitgaard, Robert (1998). *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Lubis, Mochtar dan Scott, James C. (1995). *Bunga Rampai Korupsi*. Jakarta: LP3ES dan Obor.
- Novita, Dila (2016). Konstruksi Media dalam Memberitakan Politisi Perempuan yang Terlibat Korupsi (Analisis Framing Kritis Pemberitaan Harian Umum *Kompas* Terhadap Kasus Korupsi Angelina Sondakh). *Jurnal AKP*, 2 (6), 73-103. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/72289-ID-konstruksi-media-dalam-memberitakan-poli.pdf>.
- Neuman, W. Lawrence (2016). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Pendekatan Kuantitatif*. Edisi ke-7. Jakarta: Indeks.
- “Outlook Korupsi Politik 2018: Ancaman Korupsi di Balik Pemilu 2018 dan 2019,” 1-8. Retrieved March 21, 2019, from https://antikorupsi.org/sites/default/files/outlook_korupsi_politik_2018_110118.pdf.
- “Plot Twist, KPK Sasar PDIP?” Retrieved January 13, 2020, from <https://www.pinterpolitik.com/plot-twist-kpk-sasar-pdip/>
- “Political Corruption Law and Legal Definition.” Retrieved March 18, 2019, from <https://definitions.uslegal.com/p/political-corruption/>
- Prawiradiredja, Sanhari (2017). Analisis Pemberitaan Operasi Tangkap Tangan KPK. *Penelitian Mandiri Dosen Universitas Dr. Soetomo*, 1-31. Retrieved from <http://repository.unitomo.ac.id/450/>
- Rahardjo, Mudjia (2018). Paradigma Interpretif, 1-5. <http://repository.uinmalang.ac.id/2437/1/2437.pdf>.
- Ramadhani, Wahyu, Iskandar, Said dan Radhali (2018). Legalitas Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Gubernur Aceh. *Syah Kuala Law Journal*, 3 (2), 455-470. Retrieved from <https://doi.org/10.24815/sklj.v2i3.11604>.
- Rivaldi, Sacandra Aji (2017). *Korupsi dalam Konstruksi Media: Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Korupsi di Televisi Swasta Nasional TV One dan Kompas TV (Unpublished Postgraduate Thesis)*. 1-283. Retrieved from <https://lib.unnes.ac.id/27031/>
- Romli, Asep Syamsul M. (2012). *Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online*. Bandung: Nuansa Cendikia.
- Salam, Dharma Setyawan (2004). *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Saptya, Ranga M.P (2007). Louis Althusser: Ideologi. Retrieved March 21, 2019, from <https://sharkiedick.wordpress.com/louis-althusser-ideologi/>
- “Sekilas KPK.” Retrieved March 22, 2019, from <http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk>.

Simorangkir, J.C.T (1983). *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru.

Snow, Shane (2017). "Why Major Institutions Lost Public Trust, and How They Can Gain It Back". Retrieved January 13, 2020, from <https://contently.com/2017/12/15/institutions-regain-public-trust/>

Sobur, Alex (2015). *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Cetakan ke-12. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Suwarni, E. (2018). Penegakan Hukum atas Korupsi Politik (Review Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang), 4 (03), 953-966. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/27105>.

Tamburaka, Apriyadi (2012). *Agenda Setting Media Massa*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Widjojanto, Bambang (2017). Relasi Korupsi Korporasi dan Korupsi Politik: Kajian Awal Melacak Korupsi Politik di Korporasi. *Jurnal Integritas*, 1 (3), 31-52. Retrieved from <https://doi.org/10.32697/integritas.v3i1.139>.

Zak, Paul J. (2017). The Neuroscience of Trust. *Harvard Business Review*. Retrieved January 19, 2020, from <https://hbr.org/2017/01/the-neuroscience-of-trust>.